



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

LAKIP 2019



LAPORAN KINERJA
2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM & PTSP)

JLN. SETIA BUDI NO. 15 PADANG TELP. (0751) 811341, FAX. (0751) 811342
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

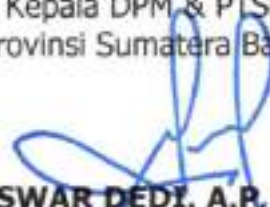
Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah / lembaga negara yang dibiayai dari anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021; dan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 berikut realisasinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuing improvement).

Hasil penilaian yang terdapat dalam laporan kinerja 2019 ini diharapkan dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholder dan menjadi dasar perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di tahun mendatang.

Padang, Januari 2020
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat



MASWAR DEDY. A.P. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001

RingkasanEkskutif

Pengukuran kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Dalam "Membangun kinerja", disebutkan bahwa kinerja mencakup tiga komponen penting yaitu hasil kerja, proses kerja dan satuan waktu kerja. Hasil kerja merupakan perbandingan antara target normatif organisasi dengan realisasi yang dicapai. Sedangkan proses kerja berkaitan dengan serangkaian aktivitas dalam organisasi.

Pengukuran kinerja melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Adapun elemen pada suatu pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja

Sesuai dengan penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuan dan sasaran strategis, dimana tujuan, indikator tujuan dan sasaran strategis indikator sasaran strategis, yaitu :

Tujuan :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

dengan Indikator Kinerja : Persentase Pertumbuhan Investasi

2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

dengan indikator kinerja : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat ;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Dari 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka akan diukur kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditargetkan dan dirinci sesuai program/kegiatan tahun anggaran 2019 yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun 2019, sesuai sasaran strategis adalah dengan menetapkan indikator capaian kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat

dengan indikator kinerja : Nilai Realisasi Investasi PMA dan
PMDN

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dengan indikator kinerja : 1. Persentase Perizinan Yang
Diterbitkan Tepat Waktu;
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)

3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi (SKPD)

dengan indikator kinerja : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Hasil capaian kinerja Tujuan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat
pada tabel berikut:

**Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2019**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi	4,02	13,80	343,28 %
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB	BB	100 %

Pada tabel di atas mengenai pengukuran capaian kinerja tujuan
meningkatnya pertumbuhan investasi melebihi target yang

ditetapkan dengan kategori "Sangat Baik" dan capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kinerja Organisasi tahun 2019 berhasil dicapai sesuai target yang ditetapkan dengan kategori nilai "Baik".

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2019**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat (*)	Nilai Realisasi PMA dan PMDN : - PMA (ribu US \$) - PMDN (juta Rp.) - Total (juta Rp.)	120.000,00 2.750.000,00 4.358.000,00	157.113,90 3.026.645,80 5.383.354,30	130,93% 110,06% 123,53%
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat					121,51%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu b. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00% 3,35	82,51% 3,27	100,62% 97,61%
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu					99,12%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Organisasi					100%
Rata – rata Capaian Kinerja Keseluruhan					106,89%

Daftar Isi

Halaman

PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKAT	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Maksud dan Tujuan
1.3	Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
1.4	Sistematika Penulisan
1.5	Isu Strategis
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
2.1	Umum
2.2	Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021
2.3	Strategi dan Arah Kebijakan
2.4	Program dan Kegiatan
2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.6	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2019
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2019
3.2	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
3.3	Evaluasi Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
3.4	Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP
4.1	Kesimpulan
4.2	Saran
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	

2. Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Renstra DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
3. Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan Tahun 2019 DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
4. Realisasi PMA di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019
5. Realisasi PMDN di Sumatera Barat Tahun 2019
6. Izin Prinsip PMA Yang Berlokasi di Sumatera Barat Tahun 2019
7. Izin Prinsip PMA di Sumatera Barat Berdasarkan Negara Asal Tahun 2019
8. Izin Prinsip PMA di Sumatera Barat Berdasarkan Sektor Tahun 2019
9. Izin Prinsip PMA di Sumatera Barat Berdasarkan Lokasi Tahun 2019
10. Izin Prinsip PMDN di Sumatera Barat Berdasarkan Perusahaan Tahun 2019.
11. Izin Prinsip PMDN di Sumatera Barat Berdasarkan Lokasi Tahun 2019
12. Izin Prinsip PMDN di Sumatera Barat Berdasarkan Sektor Tahun 2019

Daftar Singkatan

No.	Singkatan	Penjelasan
1	DPM & PTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
3	PMA	Penanaman Modal Asing
4	LKPM	Laporan Kegiatan Penanaman Modal
5	APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
6	APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1.	Komposisi Tingkat Pendidikan I.11
Tabel 1.2.	Komposisi Golongan Pegawai I.12
Tabel 1.3.	Daftar Aset I.14
Tabel 1.4.	Daftar Kendaraan Dinas I.16
Tabel 1.5.	Pelayanan Dasar Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dan Penyelesaian Permasalahan Investasi I.17
Tabel 1.6.	Pelayanan Dasar Pelayanan Penanaman Modal Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu I.18
Tabel 1.7.	Pelayanan Dasar Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu I.18
Tabel 1.8.	Pelayanan Dasar Pelayanan Penanaman Modal Promosi Investasi I.19
Tabel 1.9.	Pelayanan Dasar Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu I.20
Tabel 1.10.	Pelayanan Dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal I.20
Tabel 1.11.	Pelayanan Dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal I.21
Tabel 2.1.	Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja II.7
Tabel 2.2.	Daftar Indikator Kinerja Utama II.14
Tabel 2.3.	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 II.15
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 II.17
Tabel 3.1.	Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan III.4
Tabel 3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan III.5
Tabel 3.3.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis III.5
Tabel 3.4.	Tabel Hasil Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja III.8
Tabel 3.5.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 III.10
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Investasi III.13
Tabel 3.7.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 III.14
Tabel 3.8.	Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu III.17
Tabel 3.9.	Perbandingan Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu III.18
Tabel 3.10.	Pedoman Penilaian Pelayanan Publik III.20
Tabel 3.11.	Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) III.21
Tabel 3.12.	Perbandingan Pengukuran Indikator Kinerja IKM III.24

Tabel 3.13	Pengukuran Capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	III.26
Tabel 3.14	Aspek Penilaian Akuntabilitas Kinerja	III.30
Tabel 3.15	Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	III.31
Tabel 3.16	Pagu Program dan Kegiatan Tahun 2019	III.33

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1.1.	Bagan Struktur Organisasi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	I.9
Gambar 1.2.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019	I.10
Gambar 1.3.	Komposisi Tingkat Pendidikan Tahun 2019	I.10
Gambar 1.4.	Komposisi Tingkat Pendidikan	I.13

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan di Tahun 2019.

1.1 Latar Belakang

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2016-2021 merupakan tujuan penyusunan Laporan Kinerja disamping juga sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah

diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).

Setiap Laporan Kinerja dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luar dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 kepada Gubernur Sumatera Barat..

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas

pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Perda di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- b) Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
- d) Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha; dan
- e) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pelayanan adalah suatu usaha membantu menyiapkan apa yang diperlukan orang lain. Dan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dasar Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dan Penyelesaian Permasalahan Investasi dengan indikator Jumlah Masalah

Pelayanan Terpadu terkait Perizinan dan Non Perizinan yang Terfasilitasi dan Termediasi serta Jumlah Permasalahan Investasi Yang Difasilitasi Penyelesaiannya.

2. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi, dengan indikator Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu.
3. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi, dengan indikator Jumlah Izin dan Rekomendasi Yang Diterbitkan oleh PTSP.
4. Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dengan indikator jumlah event yang diikuti terkait promosi potensi dan peluang investasi Sumatera Barat.
5. Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal dengan indikator Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pengawasan.
6. Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dapat tercapai 100%, dengan jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan

SPIPISE sebanyak 4 (empat) jenis pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS) juga telah berlakunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, dengan indikator Jumlah Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Badan,
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari;
 - a) Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 - b) Seksi Deregulasi Penanaman Modal
 - c) Seksi Pemberdayaan Usaha
4. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari;
 - a) Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

- b) Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal
- c) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal
- 5. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim Informasi Penanaman Modal, terdiri dari;
 - a) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c) Seksi Pengolahan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal
- 6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari;
 - a) Seksi Pelayanan Perizinan I
 - b) Seksi Pelayanan Perizinan II
 - c) Seksi Pelayanan Non Perizinan
- 7. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari;
 - a) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 - b) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
 - c) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada tahun 2019 ini, sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 November 2016. Dalam Perda tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menjadi Organisasi Perangkat Daerah dengan tipologi B, yang

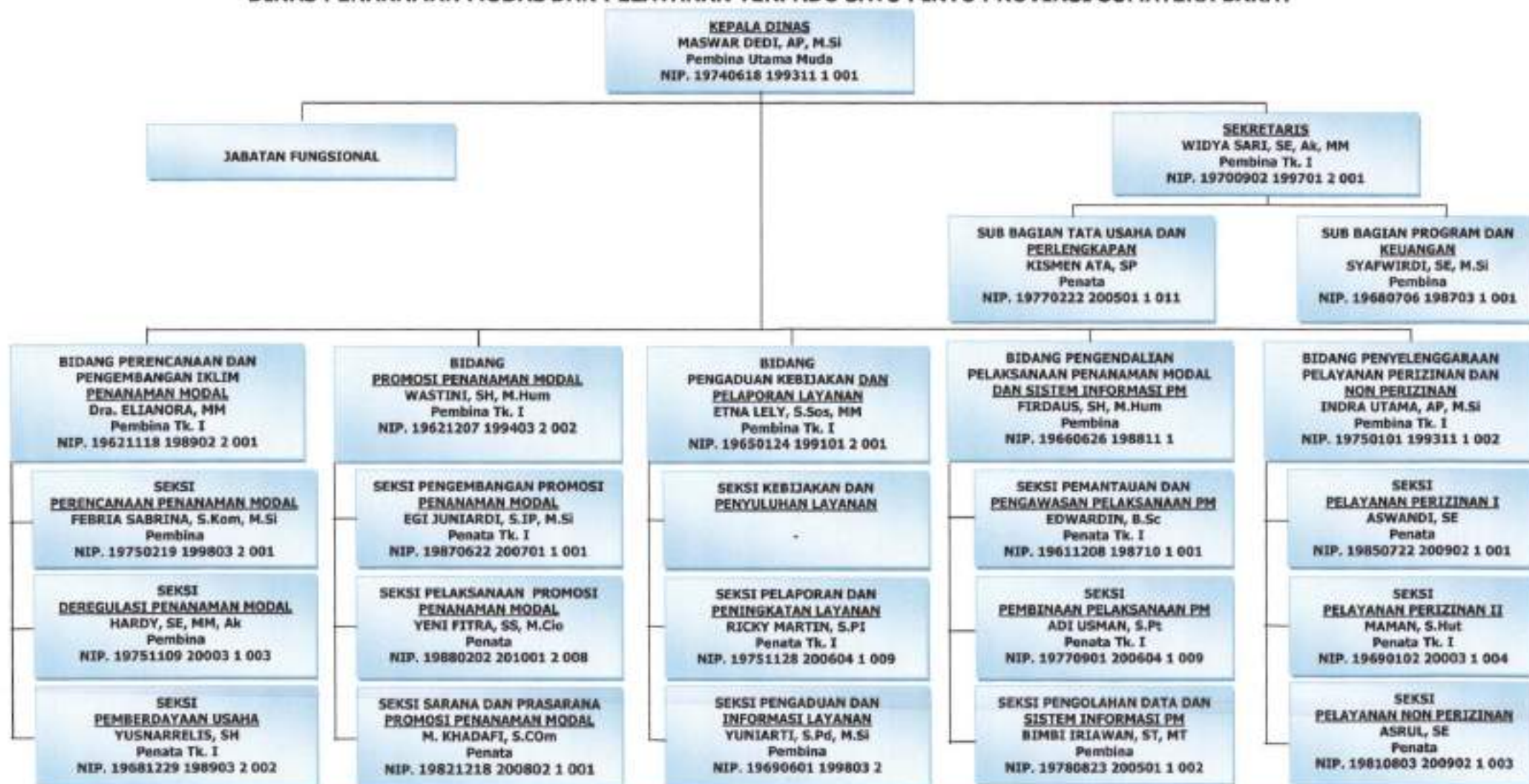
selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.

1.3.2. Struktur Organisasi

Pada laporan kinerja ini, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mengacu sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Adapun struktur organisasi yang menjelaskan kedudukan dari Kepala Badan hingga Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan sebagaimana gambar struktur organisasi berikut:

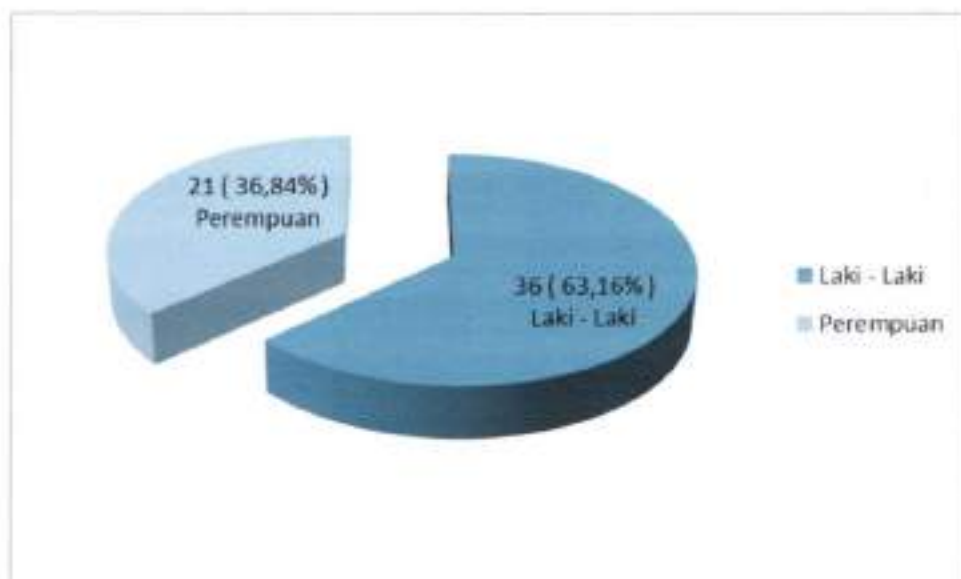
Gambar 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT



1.3.3. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 57 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 22 orang (38,60%) perempuan dan 35 orang (61,40%) laki-laki. Dari data tersebut terdapat ketimpangan jumlah perempuan dengan laki-laki sebesar 22,81% namun ketimpangan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Gambar 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Berikut ini adalah tingkat pendidikan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

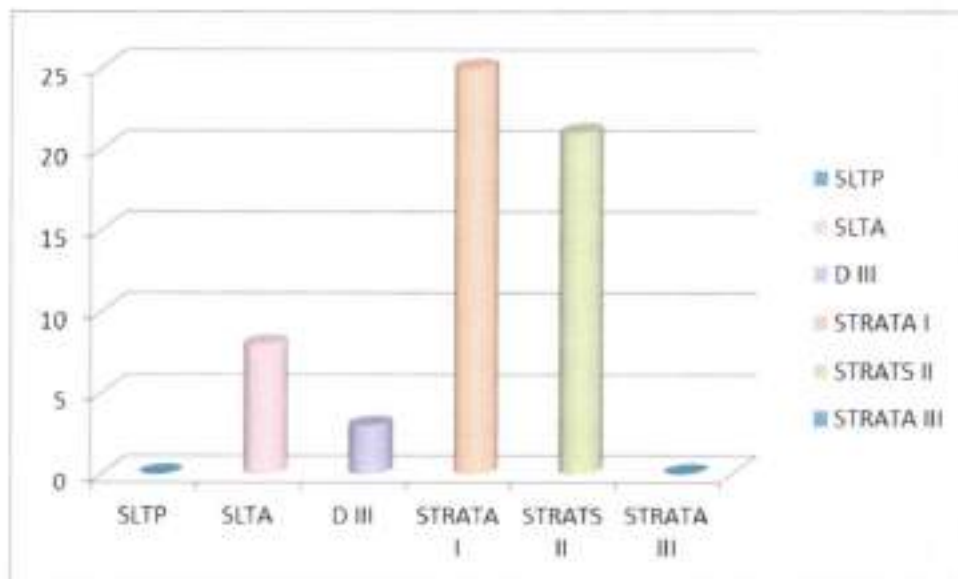
Tabel 1.1
Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4
1	SLTP	-	0 %
2	SLTA	8	14,04 %
3	DIPLOMA III/ D-3	3	5,26 %
4	STRATA 1	25	42,10 %
5	STRATA 2	21	38,60 %
6	STRATA 3	-	0 %
	JUMLAH	57	100,00 %

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena lebih dari 85,96% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 14,04% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 1.3
Komposisi Tingkat Pendidikan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:

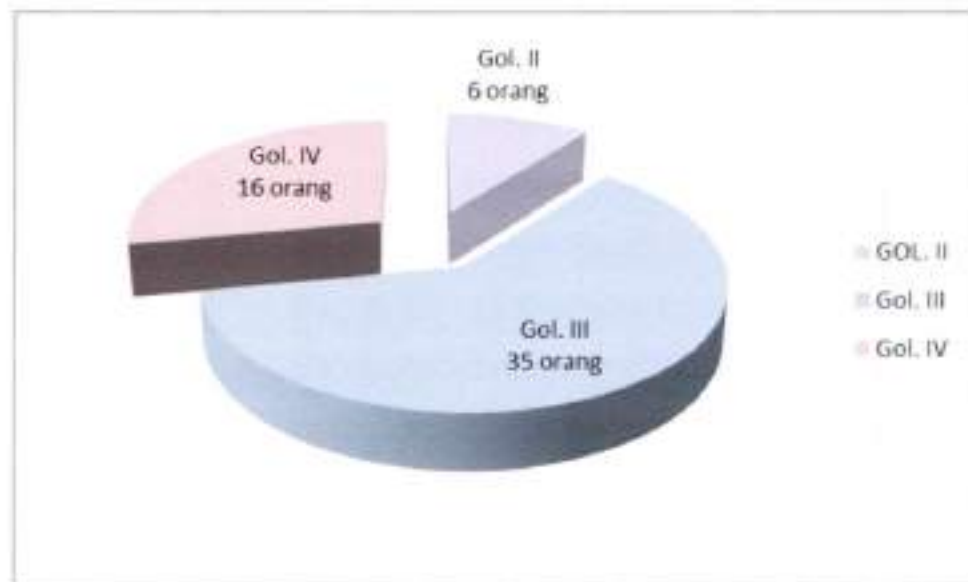
Tabel 1.2
Komposisi Golongan Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4
1	Golongan I	0	0 %
2	Golongan II	6	10,53 %
3	Golongan III	35	61,40 %
4	Golongan IV	16	28,07 %
	JUMLAH	57	100,00 %

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 61,40% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III. Apabila dibandingkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan pegawai, maka sebagian besar pegawai telah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Berikut jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per golongan:

Gambar 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Subbag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

1.3.4. Anggaran

Pelaksanaan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 didukung oleh Dana APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 18.844.555.957,- yang terdiri dari :

- 1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 6.654.569.912,-**
 - a) Gaji dan Tunjangan : Rp. 4.091.028.911,-
 - b) Tambahan Penghasilan PNS : Rp. 2.528.607.768,-
 - c) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah : Rp. 35.233.233,-
- 2. Belanja Langsung : Rp. 12.189.686.045,-**
Terdiri dari : 7 Program dan 44 Kegiatan.

1.3.5. Inventarisasi Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.642.493.846,67,- terdiri atas aset tetap sebesar Rp. 1.637.002.346,67,- aset tetap lainnya sebesar Rp. 5.491.500,00,- Sarana dan prasarana yang dikelola per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Daftar Aset
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
I.	ASET TETAP	
1	Golongan Tanah Tanah	-
2	- Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat besar - Alat-alat angkutan - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Pertanian	2 unit 11 unit 7 unit 1 unit

	- Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi	492 unit 10 unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	-
4	Golongan Aset Tetap lainnya Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan	15 Buah 3 Unit
II.	ASET LAINNYA	
1	Aset tidak berwujud	5 unit
2	Aset tidak bermanfaat	-

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

1.3.6. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas dan sampai saat ini menempati gedung milik Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat dengan status pinjam pakai.

Sarana dan prasarana gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan, ruangan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ruangan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, ruangan Bidang Promosi Penanaman Modal dan ruangan

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Selain itu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga terdapat ruangan rapat, ruang tunggu pelayanan, Mushala dan lain sebagainya.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 (delapan) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.4 dibawah:

Tabel 1.4
Daftar Kendaraan Dinas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk	Tahun Pembuatan
1	2	3	4	5
1.	Mobil	Honda Accord	Operasional	2007
2.	Mobil	Mitsubishi Kuda	Operasional	2002
3.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2006
4.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2012
5.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2018
6.	Mobil	Mitsubishi Triton	Operasional	2016
7.	Mobil	Mitsubishi Pajero	Operasional	2017
8.	Mobil	Kijang Innova	Operasional	2006
9.	Sepeda Motor	Honda Varlo	Operasional	2018
10.	Sepeda Motor	Honda Blade	Operasional	2012
11.	Sepeda Motor	Honda	Operasional	2011

Sumber : Laporan Barang Milik Daerah DPM & PTSP Tahun 2019

1.3.7. Informasi Pelayanan

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dasar terkait dengan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dan Penyelesaian Permasalahan Investasi adalah bentuk pelayanan yang diberikan berupa penyelesaian permasalahan baik dalam pelayanan terpadu terkait perizinan dan non perizinan serta fasilitasi dan mediasi terkait dengan permasalahan investasi dengan indikator Jumlah Pengaduan Masalah Pelayanan Terpadu terkait Perizinan dan Non Perizinan yang Terfasilitasi dan Termediasi serta Jumlah Permasalahan Investasi Yang Difasilitasi Penyelesaiannya. Terkait dengan jumlah pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terfasilitasi dan termediasi dan Jumlah Penyelesaian Permasalahan Investasi, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Pelayanan Dasar Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu dan
Penyelesaian Permasalahan Investasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

No	Kegiatan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu	-	-	23	21
2.	Penyelesaian Permasalahan Investasi	9	4	9	6

Sumber : Bidang Perencanaan DPM & PTSP Tahun 2019

2. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi, dengan indikator Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu. Terkait dengan indikator Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6
Pelayanan Dasar Pelayanan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

No	Kegiatan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu	76,29	80,04	84,10	80,51

Sumber : Bidang Penyelenggaraan PTSP DPM & PTSP Tahun 2019

3. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi, dengan indikator Jumlah Izin dan Rekomendasi Yang Diterbitkan oleh PTSP. Terkait dengan indikator jumlah izin dan rekomendasi yang diterbitkan, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.7
Pelayanan Dasar Pelayanan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

No	Kegiatan	Tahun
----	----------	-------

		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1.105	2.119	3.125	3.174

Sumber : Bidang Penyelenggaraan PTSP DPM & PTSP Tahun 2019

4. Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dengan indikator jumlah event yang diikuti terkait promosi potensi dan peluang investasi Sumatera Barat. Terkait dengan indikator jumlah event yang dapat diikuti dalam rangka pelaksanaan promosi investasi, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.8
Pelayanan Dasar Pelayanan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

No	Kegiatan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Promosi Investasi	8	13	17	22

Sumber : Bidang Penyelenggaraan PTSP DPM & PTSP Tahun 2019

5. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi, dengan indikator Jumlah Izin dan Rekomendasi Yang Diterbitkan oleh PTSP. Terkait dengan indikator jumlah izin dan rekomendasi yang diterbitkan, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.9.
Pelayanan Dasar Pelayanan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

No	Kegiatan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1.105	2.119	3.125	3.174

Sumber : Bidang Penyelenggaraan PTSP DPM & PTSP Tahun 2019

6. Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal dengan indikator Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pengawasan, Terkait dengan indikator jumlah izin dan rekomendasi yang diterbitkan, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.10
Pelayanan Dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

No	Kegiatan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	12	12	19	29

Sumber : Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM dan SIPM DPM & PTSP Tahun 2019

7. Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi

dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dapat tercapai 100%, dengan jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE sebanyak 4 (empat) jenis pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS) juga telah berlakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota di Sumatera Barat, dengan indikator adanya Sistem Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi berbasis Teknologi Informasi. Terkait dengan indikator Sistem Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi berbasis Teknologi Informasi, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.11
Pelayanan Dasar Pengelolaan Data & Sistem Informasi Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

No	Kegiatan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1.	Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Informasi	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem

Sumber : Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM dan SIPM DPM & PTSP Tahun 2019

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mendeskripsikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2019. Capaian Kinerja (performance results) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan)

Tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun 2019, dasar hukum, dan sistematika penulisan Laporan Kinerja.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja, yang berisi Rencana Strategis, menjelaskan muatan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2016-2021, RKT dan PK Tahun 2019.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

1.5 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dijumpai beberapa permasalahan pokok yang akan diangkat menjadi isu-isu strategis dalam penyusunan rencana strategis ini, yaitu:

1. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang pasti dan konsisten. Faktor ini berpotensi menjadi penghambat minat investor dalam melirik Sumatera Barat sebagai tujuan investasi. Kecendrungan setiap investor yang menghendaki stabilitas keamanan terhadap proses investasi perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah.
2. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta Mekanisme Kerja Pelayanan Satu Pintu.

Tugas utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerja Sama Dunia Usaha. Untuk bisa memberikan pelayanan Perizinan yang Tepat Waktu sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan dan Mekanisme Kerja perlu dilakukan Perubahan dan Penyesuaian SOP dan SP serta Mekanisme Kerja terkait dengan pelaksanaan Kajian Teknis yang dilakukan oleh OPD Teknis. Sehingga pelayanan perizinan yang diberikan sesuai dengan SOP dan SP yang telah ditetapkan.

3. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi antar daerah kabupaten/kota berkaitan dengan potensi dan daya saing unggulan yang dibangun oleh masing-masing daerah. Setiap daerah perlu memiliki potensi dan sumber keunggulan untuk bersaing yang dapat membedakan mereka dengan daerah lainnya, baik antar daerah didalam provinsi maupun dengan daerah lain diluar provinsi.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Regulasi yang belum efektif dan sering tumpang tindih berkaitan dengan penanaman modal baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Keefektifan regulasi tersebut dari kepastian pelaksanaan hukum dan peraturan. Kepastian tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dan biaya yang ditimbulkan sehingga resiko kurang dapat dikalkulasi.
6. Masih belum tersedianya informasi yang akurat dan minimnya dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, dan business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah.

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini secara umum menjelaskan tentang arah kebijakan, program utama, strategi, program dan kegiatan, serta Rencana Strategis Implementatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran DPM & PTSP, Rencana Kinerja Tahunan serta Penetapan Kinerja 2019.

2.1 UMUM

Diantara misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 adalah meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, serta Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah merupakan persyaratan yang tak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Misi tersebut diatas memiliki tujuan terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Pertumbuhan Investasi
- Meningkatnya Kinerja Organisasi

Selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi

Sumatera Barat, maka arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah agar Realisasi Investasi di Sumatera Barat terus Meningkat serta Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus menunjukkan perbaikan sesuai dengan SOP dan SP yang telah ditetapkan dalam rangka Peningkatan Pertumbuhan Investasi dan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang terus menunjukkan peningkatan yang berdampak kepada Peningkatan dalam Pengelolaan Organisasi.

Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

- Efektivitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sangat diperlukan untuk meningkatkan realisasi investasi.

- Kreatif dan komprehensif dengan mengedepankan unsur stabilitas dan potensi daerah sangat diperlukan dalam promosi investasi atas potensi dan peluang investasi yang ada di daerah.

- Database investasi berupa profil dan potensi peluang investasi secara lengkap dan dapat diperbaharui setiap periode untuk meningkatkan kualitas data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah.

- Peningkatan kompetensi aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur dibidang penanaman modal.

- Pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif dan transparan.

2.2 RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

VISI DAN MISI

Visi

Dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kewenangan daerah dibidang Penanaman Modal, agar terarah dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai supaya tercipta kesamaan pandangan dan partisipasi melalui perumusan, masukan, saran, aspirasi dan inspirasi seluruh bidang-bidang, disusun rumusan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Rumusan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mencerminkan apa yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2016-2021 adalah:

" MENJADIKAN SUMATERA BARAT SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI YANG MENARIK, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING"

Makna pokok yang terkandung dalam visi di atas adalah:

- **Tujuan investasi yang menarik**, maksudnya mampu menjadikan dan mengkomunikasikan semua potensi investasi yang terdapat di Sumatera Barat, sehingga mampu menarik minat para calon investor untuk menanamkan modalnya di masa mendatang.
- **Unggul**, maksudnya mampu mengeksplorasi keunggulan sumberdaya daerah dan pelayanan investasi yang berkualitas melalui serangkaian pendekatan yang inovatif dan professional.
- **Berdayasaing**, maksudnya mampu mengeksplorasi keunggulan dan keunikan sumberdaya daerah dan pelayanan investasi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain.

Misi

Misi suatu instansi pemerintah merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah negara.

Selaras dengan Visi yang telah ditetapkan, Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat.

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat;
2. Meningkatkan Pelayanan Investasi yang Berkualitas; dan
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Baik.

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan Misi yang telah dirumuskan dengan pertimbangan faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat secara umum adalah agar realisasi investasi yang direalisasikan oleh investor dapat menjadi pendorong ekonomi kerakyatan dan membuka peluang kesempatan kerja bagi sekitar khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya.

Pencapaian tujuan umum pelaksanaan Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Sumatera Barat, banyak melibatkan Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Daerah dalam meningkatkan investasi sesuai dengan tugas dan kewenangan pada masing-masing Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Daerah.

Secara khusus berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha, tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut :

Misi pertama, Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat.

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi.

Sasaran : Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat.

Misi kedua, Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas.

Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Misi ketiga, Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Yang Baik.

Tujuan : Meningkatnya Kinerja Organisasi.

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 065 – 1038 – 2018 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 tentang Penetapan Hasil Rekomendasi Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Penyelarasan Tujuan dalam Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2021 serta Revisi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah 2016 – 2021 terjadi penyesuaian atas Tujuan beserta indikator tujuan, Sasaran Strategis beserta indikatornya, berikut matrik hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.1.
Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Visi : MENJADIKAN SUMATERA BARAT SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI YANG MENARIK, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING			
Misi 1 : Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat.			
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi PMA dan PMDN
Misi 2 : Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas			
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu. 2. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola (pada DPM & PTSP) yang baik.			
3.	Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2016-2021 yang telah dirubah, disusun strategi sebagai berikut:

1. Efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sangat diperlukan untuk meningkatkan realisasi investasi.
2. Kreatifitas dan komprehensif dengan mengedepankan unsur stabilitas dan potensi daerah sangat diperlukan dalam promosi investasi atas potensi dan peluang investasi yang ada di daerah.

3. Database investasi berupa profil dan potensi peluang investasi secara lengkap dan dapat diperbaharui setiap periode untuk meningkatkan kualitas data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah.
4. Peningkatan kompetensi aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur dibidang penanaman modal.
5. Pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif dan transparan.

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan program lima tahun dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Upaya peningkatan realisasi investasi di Sumatera Barat, ditetapkan dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan upaya promosi investasi;
 - b. Peningkatan kerjasama dalam penanaman modal;
 - c. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - d. Peningkatan kemudahan dan fasilitas investasi.
2. Upaya mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif dan transparan, ditetapkan dengan kebijakan:
 - a. Pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi;

- b. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan;
 - c. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi SOP.
- 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal, ditetapkan dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan kompetensi aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. Pembinaan layanan perizinan kabupaten/kota;

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada isu strategis bidang pemerintahan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat menyusun rencana program dan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan atas Misi kedua RPJMD 2016-2021 yaitu " Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional" dengan tujuan untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

Sasaran dari misi tersebut adalah meningkatnya kompetensi aparatur daerah, meningkatnya kinerja aparatur daerah dalam bekerja. Sebagai bagian dari indikator perencanaan pembangunan, selanjutnya tingkat Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis ini sebagai implementasi RPJMD di tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Isu-isu strategis di tingkat SKPD dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahap akhir, pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) oleh pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah:

A. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat
3. Kerjasama Promosi dan Misi Investasi
4. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Gelar Potensi dan Temu Usaha
6. Promosi Investasi
7. Pertemuan Strategi Promosi peluang Investasi
8. Forum Investasi Sumatera Barat
9. Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi

10. Penyelesaian Permasalahan Investasi
 11. Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat
 12. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal
 13. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal
 14. Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah
- B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Informasi
 2. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu
 3. Sinkronisasi dan Harmonisasi Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
 4. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan
 5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 7. Penilaian Standar Mutu Perizinan

Secara keseluruhan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 telah mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Renstra BKD telah mengakomodir keseluruhan program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2016-2021, antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Disamping itu, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) pada Laporan Kinerja.

Pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga telah menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, mengembangkan keberhasilan sesuatu yang terukur. Merujuk pada Peraturan diatas maka Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai RPJMD dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TERPILIH

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
I. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi					
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN - PMA (ribu US \$) - PMDN (juta Rp.) - Total (juta Rp.)	39.754,32 3.185.075,82 3.717.783,70	Jumlah realisasi investasi berdasarkan laporan LKPM yang direlease oleh BKPM RI	Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM dan SIPM
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu (%) b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (rasio)	50 3,16	$\frac{\text{Jumlah Terbitnya Perizinan Sesuai SOP}}{\text{Jumlah Permohonan Izin Yang Diterima}} \times 100\%$ IKM didasarkan atas hasil pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei kepuasan	Bidang Penyelenggaraan PTSP Bidang PKPL
II. Meningkatnya Kinerja Organisasi					
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	C	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja SKPD oleh Inspektorat	Sekretariat

Catt : 1 US \$ = Rp. 13.400,-

2.6 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2019, Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	a. Nilai Realisasi Investasi : - PMA (ribu US \$) - PMDN (juta Rp.) - Total (juta Rp.)	120.000,00 2.750.000,00 4.358.000,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82% 3,35
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

2.7 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD yaitu meningkatnya kompetensi aparatur daerah. Sebagai implementasi pencapaian sasaran tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran strategis yaitu, Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Untuk mencapai sasaran strategis instansi menetapkan indikator kinerja utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah membuat penetapan kinerja tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	a. Nilai Realisasi Investasi : - PMA (ribu US \$) - PMDN (juta Rp.) - Total (juta Rp.)	120.000,00 2.750.000,00 4.358.000,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	b. Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	82%
		c. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,35
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	d. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

Akuntabilitas Kinerja

Bab ini secara umum menjelaskan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja, pencapaian indikatornya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dan membahas Akuntabilitas Keuangan.

3.1 PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran hasil atau tingkat keberhasilan individu secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Dalam "Membangun Kinerja", disebutkan bahwa kinerja mencakup tiga komponen penting yaitu hasil kerja, proses kerja dan satuan waktu kerja. Hasil kerja merupakan perbandingan antara target normatif organisasi dengan realisasi yang dicapai. Sedangkan proses kerja berkaitan dengan serangkaian aktivitas dalam organisasi. Satuan waktu kerja berkaitan dengan kapan dilakukan pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai berikut:

1. Jika indikator sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala penilaian pengukuran yang digunakan sebagai berikut:

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	2	3
4	Lebih dari 100%	Sangat baik
3	75% sampai 100%	Baik
2	55% sampai 75%	Cukup
1	Kurang dari 55%	Kurang

2. Sebaliknya bila indikator sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Kurang
2	75% sampai 100%	Cukup
3	55% sampai 75%	Baik
4	Kurang dari 55%	Sangat baik

Pengukuran kinerja melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

Adapun elemen pada suatu pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
4. Evaluasi kinerja

Sesuai dengan penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuan dan sasaran strategis, dimana tujuan, indikator tujuan dan sasaran strategis indikator sasaran strategis, yaitu :

Tujuan :**1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi**

dengan Indikator Kinerja : Persentase Pertumbuhan Investasi

2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

dengan indikator kinerja : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat ;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Dari 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka akan diukur kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditargetkan dan dirinci sesuai program/kegiatan tahun anggaran 2019 yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun 2019, sesuai sasaran strategis adalah dengan menetapkan indikator capaian kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat

dengan indikator kinerja : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Dengan indikator kinerja :
1. Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu;
 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi (SKPD)

dengan indikator kinerja : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Hasil capaian kinerja Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2019

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi	4,02	13,80	343,28 %
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	BB	BB	100 %

Pada tabel di atas mengenai pengukuran capaian kinerja tujuan meningkatnya pertumbuhan investasi melebihi target yang ditetapkan dengan kategori "Sangat Baik" dan capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kinerja Organisasi tahun 2019 berhasil dicapai sesuai target yang ditetapkan dengan kategori nilai "Baik".

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tujuan tahun 2018, hasilnya menurun 31,45% pada tujuan pertama Meningkatnya Pertumbuhan Investasi. Perbandingan Capaian kinerja tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 dan 2019

NO	Tujuan	INDIKATOR KINERJA	% REALISASI KINERJA		% CAPAIAN KINERJA	
			2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Persentase Pertumbuhan Investasi	14,80	13,80	373,74	343,28
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai AKuntabilitas Kinerja Organisasi	B 69,66	BB 70,55	100	100

Hasil capaian kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
L.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat (*)	Nilai Realisasi PMA dan PMDN : - PMA (ribu US \$) - PMDN (juta Rp.) - Total (juta Rp.)	120.000,00 2.750.000,00 4.358.000,00	157.113,90 3.026.645,80 5.383.354,30	130,93% 110,06% 123,53%
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat					121,51%

2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	82,00%	82,51%	100,62%
		b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,35	3,27	97,61%
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu					99,12%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Organisasi					100%
Rata – rata Capaian Kinerja Keseluruhan					106,89%

Pada tabel di atas mengenai pengukuran capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara keseluruhan capaian kinerja adalah sebesar 106,89% menurun 27,39% dibandingkan tahun 2018 dimana capaian kinerjanya sebesar 134,27%. Dari ketiga sasaran strategis yang ditetapkan terdapat 1 sasaran strategis dengan hasil capaian dikategorikan dengan nilai "Sangat Baik" dengan nilai persentase capaian kinerja antara diatas 100%, dan 2 (dua) sasaran strategis berkategori "Baik" dengan nilai 99,12% dan 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran Tahun 2018, hasilnya menurun yakni dari ketiga sasaran strategis nilai persentase capaian kinerjanya "Sangat Baik" dengan nilai diatas 100% , dimana capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat dengan capaian sebesar 199,75%, capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian sebesar 102,11% dan capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dengan capaian sebesar 100,95%.

Oleh karena itu terhadap berbagai target capaian kinerja yang tidak tercapai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat harus melakukan langkah konkrit untuk menganalisis dan mengevaluasi agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan penanganan di masa mendatang terutama untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dimana respondennya mempunyai kategori tersendiri oleh pihak ketiga sebagai pengukur Indeks Kepuasan Masyarakat Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Dari capaian kinerja diatas, dapat dibandingkan hasil pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan 2018 (sesuai sasaran strategis hasil penyelarasan Revisi RPJMD dan Revisi Renstra SKPD serta Penetapan hasil Rekomendasi Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat), sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tabel Hasil Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2016 s/d Tahun 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% REALISASI KINERJA				% CAPAIAN KINERJA			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi PMA dan PMDN : - PMA (ribu US \$) - PMDN (juta Rp.) - Total (juta Rp.)	79.268,10 3.795.575,50 4.857.768,04	194.425,20 1.516.964,30 4.122.261,98	180.799,70 2.309.449,60 4.732.165,58	157.113,90 3.026.645,80 5.383.354,30	181,27 144,72 125,63	404,19 44,89 102,45	341,69 66,36 112,95	130,93 110,06 123,53
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Persentase Perizinan Yang Diberbitkan Tepat Waktu b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,29 3,18	80,04 3,23	84,10 3,27	80,51 3,27	95,36 99,38	100,05 97,88	105,13 99,09	100,62 97,61
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja	C	B	B	BB	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja							138,19	138,19	134,27	106,89

Dari perbandingan realisasi indikator kinerja Tahun 2019 dengan tahun 2018, tahun 2017 dan tahun 2016 dapat dijelaskan, bahwa terjadi penurunan pencapaian kinerja. Jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2016, 2017 dan 2018, yaitu: 172,72%, 138,19%, 134,27% dan 106,89%.

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pembahasan Pencapaian Kinerja Per Sasaran :

1. Sasaran : Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat.

Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah Penanaman Modal (investasi) dimana kegiatannya merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor

lainnya seperti perdagangan, ekspor impor, perbankan, transportasi dan asuransi. Penanaman Modal adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselektikan oleh daerah sebagai pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

Perwujudan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saling regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah yang merupakan misi keempat dari RPJMD 2016 – 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. Mengacu pada penjelasan di atas dapat dilihat bahwa peran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk

mewujudkan pelayanan publik yang prima dengan sasaran **"meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat"** sebagai prioritas yang direncanakan dalam jangka waktu lima tahun (jangka menengah). Namun, dalam rangka pencapaian sasaran meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Barat lebih menitikberatkan pada aspek pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dinilai sebagai *core* bidang penanaman modal.

Peningkatan realisasi investasi di Sumatera Barat yang merupakan sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan strategis lima tahunan, diukur melalui indikator-indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat
Tahun 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN - PMA (ribu US \$) - PMDN (juta Rp.) - Total (juta Rp.)	120.000,00 2.750.000,00 4.358.000,00	157.113,90 3.026.645,80 5.383.354,30	130,93 110,06 123,53
Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat					121,51%

Pada tabel 3.2.1. capaian kinerja pada sasaran **" Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat "**, berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja dengan progress positif yaitu 121,51% atau tergolong dengan kategori nilai **"Sangat Baik"**.

Berdasarkan sasaran “ **Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat** ”, upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai sasaran tersebut diatas didukung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat
3. Kerjasama Promosi dan Misi Investasi
4. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Gelar Potensi dan Temu Usaha
6. Promosi Investasi
7. Pertemuan Strategi Promosi peluang Investasi
8. Forum Investasi Sumatera Barat
9. Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi
10. Penyelesaian Permasalahan Investasi
11. Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat
12. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal
13. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal
14. Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah

Berikut analisa dan evaluasi indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja : Realisasi Investasi PMA dan PMDN.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepada para Penanam Modal baik dalam negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia yang merupakan salah satu urusan wajib wajib yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada pada masing-masing daerah guna mencapai kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Pada umumnya dampak penanaman modal yang dilakukan pemerintah tidak terlalu signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penanaman modal pemerintah biasanya selalu dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan tidak jarang pula dihadapkan pada dampak inflasioner yang tinggi terhadap perekonomian (*crowding out effect*). Berdasarkan hal ini, maka untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan peran swasta nasional dan swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan persentase capaian kinerja realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2018 yang mana realisasi PMA dan PMDN sebanyak Rp. 4.732.165.580.000,- dari target sebesar Rp. 4.189.425.550.000,- sehingga capaian kinerja indikator ini pada Tahun 2018 adalah 112,95%. Persentase realisasi investasi PMA dan PMDN

tahun 2019 turun 14,68% (kondisi triwulan 3) dibandingkan Tahun 2018 dengan perbandingan, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja
Indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2018 dan 2019

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)	
	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	112,95 %	121,51 %

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang berhasil mencapai standar pelayanan yang ditetapkan.

Indikator pelayanan yang baik, sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlakukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan sasaran strategis yang akan dicapai dalam perencanaan strategis lima tahunan melalui indikator-indikator dengan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut;

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teradu Satu Pintu
Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	a. Persentase Perizinan Yang Diterbitkan tepat waktu	82 %	82,51 %	100,62 %
		b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.35	3.27	97,61 %
Rata-rata persentase capaian kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu					99,12 %

Dari pengukuran capaian kinerja meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019, untuk indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menargetkan sebesar 3.35 dan terealisasi 3.27, sehingga

capaian kinerjanya yaitu 97.61% atau bermakna progres positif dengan kategori "baik". Sedangkan untuk Indikator Persentase Perizinan yang Diterbitkan Tepat Waktu menargetkan sebesar 82% dan terealisasi 82.51% sehingga capaian kinerjanya yaitu 100,62% atau bermakna progress positif dengan kategori "sangat baik".

Berdasarkan sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu", upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk mencapai sasaran tersebut diatas didukung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Informasi
2. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu
3. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
4. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan
5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
7. Penilaian Standar Mutu Perizinan

Berikut analisa dan evaluasi indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:

**1. Indikator Kinerja : Persentase Perizinan Yang Diterbitkan
Tepat Waktu**

Waktu penyelesaian pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan penanaman modal merupakan bagian yang sangat penting

dari berbagai faktor pelayanan perizinan seperti faktor tidak ada biaya, penyederhanaan prosedur pelayanan dan faktor lainnya. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menetapkan indikator tersebut untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis tersebut di atas. Indikator *"meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu"* diukur berdasarkan persentase dari jumlah izin yang diterbitkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dibandingkan dengan jumlah permohonan perizinan yang masuk.

Perizinan PMA merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, sementara kewenangan pemerintah Provinsi adalah perizinan PMDN lintas kabupaten/kota. Dari 19 (Sembilan belas sektor) Perizinan dan Non Perizinan yang telah didelegasikan kewenangannya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Didalam memberikan pelayanan perizinan kepada investor, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik (OSS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018.

Sesuai maksud diatas dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu, salah satu indikator kinerja yang tepat adalah Persentase perizinan yang

diterbitkan tepat waktu. Untuk pengukuran indikator kinerja tersebut Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu layanan izin dan non izin (rekomendasi), SOP dan penyelesaian izin dan non izin (rekomendasi) dijadikan sebagai variabel dengan data-data yang dilakukan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Indikator Kinerja
Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
Tahun 2019

No	Sektor	Izin	Rekomen-dasi	Total	SOP (waktu)	Jumlah Sesuai SOP	Persentase Tepat Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penanaman Modal	-	-	-	7 hari	-	-
2.	Perindustrian dan Perdagangan	2	-	2	5 hari	1	50,00
3.	ESDM	491	-	491	16 hari	332	67,62
4.	Tenaga Kerja	41	1	42	3 hari	22	52,38
5.	Kesehatan	43	16	59	32 hari	33	55,93
6.	Kehutanan	114	10	124	32 hari	62	50,00
7.	Pendidikan	12	-	12	62 hari	4	33,33
8.	Kelautan dan Perikanan	492	-	492	5 hari	394	80,08
9.	Perkebunan	4	-	4	6 hari	2	50,00
10.	Lingkungan Hidup	11	-	11	92 hari	6	54,55
11.	Pariwisata	-	-	-	6 hari	-	-
12.	Perhubungan	206	59	265	14 hari	152	57,36
13.	Peternakan	23	38	61	4 hari	37	60,66
14.	PU dan Penataan Ruang	3	-	3	17 hari	3	-
15.	PSDA	9	-	9	5 hari	6	-
16.	Sosial	29	8	37	10 hari	21	56,6
17.	Perumahan Rakyat dan Pertanahan	-	-	-	30 hari	-	-
18.	Koperasi dan UKM	-	-	-	10 hari	-	-
19.	Kessbangpol	-	1562	1562	1 hari	1544	98,85
Rata-rata		1.480	1.694	3.174	-	2.619	82,51

Pada tabel diatas, jumlah izin dan non izin yang masuk sebanyak 3.174 melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 1.500, sehingga

indikator kinerja 211,60%. Sedangkan capaian Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu yang menjadi indikator kinerjanya adalah sebesar sebesar 82%, sementara realisasinya adalah sebesar 82,51%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 100,62% dengan kategori "sangat baik".

Jika dibandingkan dengan persentase capaian kinerja realisasi Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu pada tahun 2018 yang mana realisasi sebesar 84,10%,- dari target sebesar 80% sehingga capaian kinerja indikator ini pada Tahun 2018 adalah 105,13%. Persentase realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2019 turun 4,51% dibandingkan Tahun 2018. Ini disebabkan karena target kinerjanya juga mengalami kenaikan dari 80% ditahun 2018 menjadi 82% ditahun 2019, dengan perbandingan, sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Pengukuran Indikator Kinerja
Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
Tahun 2018 dan 2019

Indikator kinerja	Realisasi kinerja (%)	
	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3
Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	105,13%	100,62%

Dari tabel perbandingan diatas, capaian kinerja tahun 2019 turun sebesar 4,51%. Penurunan capaian kinerja ini disebabkan adanya kenaikan target kinerja dari Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu dari 80% ditahun 2018 menjadi 82% ditahun 2019.

Pada Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menetapkan sebanyak 465 orang responden pada 9 (sembilan) unsur pelayanan guna mengukur Indeks Kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Pengukuran menggunakan 9 (sembilan) unsur pelayanan dituangkan dalam

Pintu Provinsi Sumatera Barat. di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Tujuan melakukan pengukuran kepuasan masyarakat adalah kepada pengguna layanan.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang harus dilakukan dalam perbaikan masyarakat.

terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masadan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah saat ini memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Selain kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk

2. Indikator Kinerja : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

beberapa kriteria penilaian antara lain indeks per unsur pelayanan dan prioritas peningkatan kriteria kualitas pelayanan.

Untuk mengetahui jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ada tiga tahapan atau langkah atau metode pengolahan data yang harus dikerjakan. Pertama dengan melihat jumlah kualitas pelayanan yang diperoleh dari nilai yang diberikan oleh responden untuk ke 9 (sembilan) unsur pelayanan. Formula mendapatkan nilai ini masih mengacu pada ketentuan KEPMEN-PAN No.14 Tahun 2017, yang dianggap masih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai acuan yaitu dengan memberikan nilai persepsi antara 1 - 4. Skor 1 kriterianya apabila prosedur pelayanan tidak baik. Skor 2 apabila prosedur pelayanan kurang baik, skor 3 apabila prosedur pelayanan baik dan skor 4 apabila prosedur pelayanan sangat baik. Skor pada masing-masing unsur pelayanan itu dijumlahkan berdasarkan responden yang memberikan skor.

Tabel. 3.10
Pedoman Penilaian Pelayanan Publik
Menurut Kepmenpan Nomor : 14 Tahun 2017

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	2	3	4	5
4	3,5324 - 4,0000	88,31- 100,00	A	SANGAT BAIK
3	3,0644 - 3,5320	76,61 - 88,30	B	BAIK
2	2,6000 - 3,0640	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
1	1.0000 - 2.5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK

Kemudian tahap kedua dengan melihat IKM yang dihitung dengan menggunakan bobot nilai rata-rata tertimbang, dimana formulanya

adalah setiap unsur pelayanan dari 9 (sembilan) unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus:

Bobot Nilai rata-rata Tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur

$$= 1/9$$

$$= 0,11$$

Metode ketiga, yakni dengan melihat IKM yang menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan total dari nilai persepsi perunsur dibagi dengan total unsur yang terisi dikali dengan nilai penimbang yaitu 25.

Melalui 3 metode itulah diketahui IKM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Berikut dijelaskan uraian tentang 9 mutu pelayanan IKM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari 465 responden. Untuk memperoleh nilai Indeks rata-rata ke-9 unsur pelayanan, masing-masing skor yang telah dijumlahkan dibagi dengan jumlah responden, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat

No	Unsur Pelayanan	Semester I (Januari s.d Juni 2019)		Semester II (Januari s.d Juni 2019)		Naik / Turun
		Nilai	Kinerja Pelayanan	Nilai	Kinerja Pelayanan	
1	2	3	5	6	8	9
U1	Persyaratan	2,981	Kurang Baik	3,036	Kurang Baik	0,055
U2	Prosedur	3,005	Kurang Baik	3,112	Baik	0,107
U3	Waktu Pelayanan	2,856	Kurang Baik	3,161	Baik	0,305
U4	Biaya / Tarif	3,412	Baik	3,430	Baik	0,018

U5	Produk Layanan	4,079	Baik	3,169	Baik	0,090
U6	Kompetensi Pelaksana	3,125	Baik	3,181	Baik	0,056
U7	Perilaku Pelaksanan	3,153	Baik	3,301	Baik	0,198
U8	Maklumat Pelayanan	3,954	Sangat Baik	4,000	Sangat Baik	0,096
U9	Penganganan Pengaduan	3,273	Baik	3,598	Sangat Baik	0,325
Rata – Rata IKM		3,201	Baik	3,329	Baik	0,128
Nilai IKM		80,03	Baik	83,22	Baik	3,19

Hasil pengolahan data menunjukkan semua nilai rerata per unsur pelayanan pada Semester 1 adalah 3,201 dan Semester 2 adalah 3,329. Ini berarti semua unsur pelayanan yang diberikan terjadi kenaikan pada semester 2 sebanyak 0,128 namun 100% pelayanan yang diberikan masih berada dalam kategori Baik. Artinya secara terintegrasi dan komprehensif Mutu Pelayanan Bidang Perizinan dan Non Perizinan instansi DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat adalah berada dalam kategori "8" dengan Kinerja Unit Pelayanan "Baik".

Secara terintegrasi dan komprehensif Mutu Pelayanan Bidang Perizinan dan Non Perizinan instansi DPM dan PTSP Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 (Semester 1 dan Semester 2) adalah berada dalam kategori "B" dengan Kinerja DPMPTSP Sumater Barat "Baik". Ini ditunjukkan oleh nilai akumulatif IKM Semester 1 dengan Semester 2 sebesar $(3,201 + 3,329) : 2 = 3,270$ dan nilai IKM Konversi Semester 1 dengan Semester 2 dan sebesar $(81,976 + 81,397) : 2 = 81,746$

Dari jumlah unsur kualitas pelayanan, nilai tertinggi diperoleh dari 1 unsur yaitu unsur ke - 8 "Kepastian Biaya" dengan nilai 3,954 dan

4,000. Sedangkan kualitas unsur pelayanan terendah diperoleh unsur ke - 13 "Waktu Pelayanan" pada semester 1 yaitu dengan perolehan nilai 2,856 dan unsur ke - 1 "Persyaratan" pada semester 2 dengan perolehan nilai 3,036.

Dari unsur kepastian biaya, mayoritas responden 100% menyatakan bahwa semua jenis layanan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tidak ada biaya/gratis. Hal Ini membuktikan bahwa masyarakat merasa sangat puas dengan unsur ini karena untuk mendapatkan semua jenis layanan tidak dikenakan biaya/gratis. Sehingga unsur ini harus dipertahankan pada masa yang akan datang.

Sedangkan unsur yang memperoleh nilai terendah adalah unsur kelengkapan prasarana penunjang layanan (ruang tunggu, toilet, tempat parkir, tempat ibadah dll (unsur ke - 3 dan ke - 1). Penilaian dari 465 orang responden terhadap unsur kelengkapan prasarana layanan (ruang tunggu, toilet, tempat ibadah, kantin dll), hal ini menjadi prioritas perbaikan pada masa yang akan datang karena mendapatkan skor terendah.

Jadi dapat dikatakan bahwa meskipun secara umum dari 9 (sembilan) unsur pelayanan indeks kepuasan masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memperoleh Predikat B atau Baik, namun tetap saja harus ada upaya lembaga untuk meningkatkan unsur yang memperoleh nilai rendah terutama untuk unsur lamanya waktu penyelesaian

pelayanan, unsur kelengkapan sarana penunjang layanan (ruang tunggu, toilet, tempat parkir, tempat ibadah dan lain-lain)

Untuk mempermudah dalam menentukan unsur pelayanan yang akan diprioritaskan akan ditingkatkan kualitasnya, maka ke 9 (sembilan) unsur pelayanan akan dikelompokkan berdasarkan capaian skor tertinggi hingga terendah.

Pada capaian kinerja Tahun 2019, hasil pengukuran yang dilakukan terhadap indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan indeks sebesar 3.27 atau pada nilai interval IKM 3,26 – 4,00 dengan mutu pelayanan B (kinerja unit pelayanan "Baik") atau 81,75%. Sedang capaian kinerja tahun 2018, hasil pengukurannya sebesar 3.27 dengan mutu pelayanan B (kinerja pelayanan "Baik") atau Nilai Indeks Konversinya 81,99%.

Perbandingan pengukuran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2019 dengan 2018 adalah:

Tabel 3.12
Perbandingan Pengukuran Indikator Kinerja
Indek Kepuasan Masyarakat
Tahun 2018 dan 2019

Indikator kinerja	Realisasi kinerja (%)	
	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3
Indek Kepuasan Masyarakat	3,27	3,27
	81,99	81,75
	99,09%	97,70%

Berdasarkan interval IKM, perbandingan mutu pelayanan tahun 2019 dan 2018 adalah sama-sama B (Kinerja unit pelayanan Sangat Baik). Turunnya pencapaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

sebesar 0,25 disebabkan target Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar 0.05 dari tahun 2018 sebesar 3.30.

3. Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Sasaran meningkatnya tata kelola organisasi adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya Dukungan Tata Kelola pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat melalui indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas, dengan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%
Rata-rata persentase capaian Meningkatnya Tata Kelola Organisasi					100 %

Pengukuran capaian kinerja Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Tahun 2019, menggunakan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan. Untuk indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menargetkan kategori BB dan terealisasi BB, sehingga capaian kinerjanya yaitu 100% atau bermakna progress positif dengan kategori "sangat baik". Sedang untuk indikator Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pengelolaan program/kegiatan sesuai dengan evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan oleh Biro Organisasi indikator ini hanya sebagai penunjang saja untuk pencapaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Berdasarkan sasaran strategis "Meningkatnya Tata Kelola Organisasi", upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai sasaran strategis tersebut diatas didukung melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
9. Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Pengadaan meubeler
12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor
15. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
16. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
17. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
18. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
19. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
20. Penatausahaan Keuangan SKPD
21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Laporan Kinerja dan selanjutnya telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah. Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan revidi dan wawancara terhadap penerapan manajemen kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Adapun melalui dokumen Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dilakukan evaluasi dengan menilai aspek Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran kinerja (25%), Pelaporan kinerja (15%), Evaluasi internal (10%) dan pencapaian kinerja organisasi (20%). Selanjutnya terhadap hasil evaluasi diberikan penilaian dengan kategori akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berikut analisa dan evaluasi indikator kinerja sasaran 3 sebagai berikut:

22. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
23. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

Kategori	Nilai
1	2
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	>0-30

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 13.21/INSP-LAKIP/V-2019 Tanggal 09 Mei 2019 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 70,55% kategori BB dengan pengertian akuntabilitasnya sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal, dengan rincian:

Tabel 3.14
Pengukuran Capaian Kinerja
Aspek Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2019

No	Aspek Penilaian	Nilai
1	2	3
1	Perencanaan Kinerja	24,91%
2	Pengukuran kinerja	15,45%
3	Pelaporan kinerja	11,51%
4	Evaluasi internal	6,19%
5	Pencapaian kinerja organisasi	12,50%
Nilai total		70,55% (BB)

Indikator kinerja nilai SAKIP ditargetkan nilai BB, sesuai dengan perolehan nilai di atas maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100% dengan kategori "sangat baik". SAKIP Provinsi Sumatera Barat berdasarkan penilaian Kemenpan RB juga memperoleh nilai BB.

Jika dibandingkan nilai sakip tahun 2018, berdasarkan hasil laporan evaluasi Sakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 07.18/INSP-LKj/III-2018 tanggal 29 Maret 2018 oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebesar 69,66% kategori B dengan pengertian Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, akuntabel, berkinerja baik memiliki sistem manajemen kerja yang andal. Indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dan tahun 2018 memperoleh capaian seperti perbandingan pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja
Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
Tahun 2018 dan 2019

Indikator kinerja	Realisasi kinerja (%)	
	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B (69,66%)	BB (70,55%)

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan Tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 0,89% meskipun peningkatannya tidak signifikan.

3.3. EVALUASI CAPAIAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016-2021

Melalui evaluasi kinerja akan dihasilkan gambaran dan informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan *feedback* dan *reward-punishment*, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Sinkronisasi terhadap sasaran strategik serta indikator kinerja antara dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 telah diupayakan konsisten satu sama lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan revisi terhadap Renstra tahun 2016-2021, agar kinerja dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan melalui pengukuran kinerja per triwulan nantinya.

Dengan adanya pengukuran kinerja per triwulan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan evaluasi capaian kinerja, evaluasi program dan evaluasi kegiatan dengan mengacu dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian RPJMD 2016-2021.

Adapun pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan yang berdasarkan pada pencapaian sasaran strategik RPJMD adalah sebesar 99,21%.

Hasil evaluasi kinerja nantinya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran di masa yang akan datang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian menjadi jelas urgensi pengukuran kinerja yang merupakan tahapan sangat vital bagi keberhasilan implementasi manajemen strategis. Rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi membutuhkan wadah untuk mewujudkannya dalam bentuk aktivitas keseharian organisasi.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pagu anggaran dan realisasi belanja langsung urusan sampai dengan perubahan APBD terkait dengan pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Pagu Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019

NAMA PROGRAM	JUMLAH DANA (Rp.)
1	2
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.376.910.625
1. Penyediaan jasa surat menyurat	27.333.846
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	171.720.000
3. Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	539.454.079
4. Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.000.000
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.160.000
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	492.840.700
9. Penyediaan jasa pembinaan mental dan fisik aparatur	15.450.000

10.	Penyediaan makanan dan minuman	29.952.000
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	599.642.261
11.	Pengadaan meubeler	26.700.000
12.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000
13.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	155.657.261
14.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	52.900.000
15.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	9.385.000
16.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	305.000.000
III.	Program peningkatan disiplin aparatur	44.460.000
17.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	44.460.000
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	977.974.300
18.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	977.974.300
V.	Program peningkatan pengembangan sistem capaian sistem capaian kinerja pengelolaan keuangan	529.206.259
19.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	54.790.160
20.	Penatausahaan Keuangan SKPD	226.994.750
21.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.178.876
22.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	35.303.900

23.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	121.938.573
VI.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	4.442.420.010
24.	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	165.358.360
25.	Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat	70.761.480
26.	Kerjasama Promosi dan Misi Investasi	197.217.200
27.	Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	141.615.000
28.	Gelar Potensi dan Temu Usaha	554.963.300
29.	Promosi Investasi	2.550.856.320
30.	Pertemuan Strategi Promosi peluang Investasi	37.584.000
31.	Forum Investasi Sumatera Barat	115.301.800
32.	Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi	165.672.000
33.	Penyelesaian Permasalahan Investasi	60.451.600
34.	Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat	145.357.000
35.	Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal	42.100.000
36.	Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal	83.180.900
37.	Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah	112.001.050

VII. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	4.219.072.570
38. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi Informasi	406.740.400
39. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Terpadu	115.579.780
40. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	155.098.240
41. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	1.176.886.900
42. Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat	326.573.500
43. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	2.003.193.750
44. Penilaian Standar Mutu Perizinan	35.000.000
Total	12.189.686.025

Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut menurut sasaran yang dicapai adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat,
dengan kegiatan:

- 1. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal,** dukungan anggaran untuk kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah sebesar Rp. 165.358.360,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 164.726.425,- atau sebesar 99,62% dan realisasi fisik dapat tercapai 100%. Untuk Capaian kinerja kegiatan ini

dari 20 target perusahaan yang dilakukan pengawasan ditahun 2019 dapat direalisasikan 29 perusahaan atau dengan kinerja sebesar 145%. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah kegiatan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal serta Pemeriksaan yang dibarengi dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek perusahaan PMA/PMDN terkait dengan penerbitan izin usaha yang telah dikeluarkan terhadap perusahaan yang sudah berproduksi komersil dan telah merealisasikan investasinya minimal 75% dari rencana investasi serta proses pencabutan Surat Persetujuan/pembatalan izin usaha bagi perusahaan yang tidak pernah merealisasikan investasinya sama sekali dan tidak lagi berproduksi atau macet serta tidak diketahui keberadaanya dan tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

- Dengan demikian maksud dan tujuan dilaksanakan Pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN adalah agar penyimpangan yang dilakukan para penanam modal dapat diminimalisir sesuai ketentuan yang berlaku dan DPM & PTSP Provinsi tidak lagi mencatat data perusahaan yang tidak produktif sehingga data yang ada akan lebih baik serta diharapkan target realisasi investasi yang telah ditetapkan dapat dicapai.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah:
Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN sebanyak 29 perusahaan (melebihi target), yaitu:

- 17 perusahaan sudah produksi
 - 12 perusahaan masih dalam masa konstruksi
- Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah:
- Dengan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dapat diketahui keadaan sebenarnya dilapangan terkait investasi yang dilakukan oleh investor, seperti:
1. Apakah perusahaan masih dalam keadaan konstruksi atau tahap pembangunan;
 2. Apakah perusahaan sudah produksi komersil;
 3. Apakah perusahaan dalam keadaan macet ataupun yang sedang bermasalah
 4. Apakah perusahaan sedang menghadapi masalah atau melakukan penyimpangan dari peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal

Sumatera Barat, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat ini adalah sebesar Rp. 70.761.480,-. Dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 69.687.590,- atau (98,48%), dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.

- Maksud dari kegiatan Penyusunan Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat adalah pengumpulan dan analisis terhadap data-data penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat yang terealisasi di tahun 2019 dimana tujuannya

terkait dalam hal promosi dan misi investasi yang akan

- Mengkoordinasikan berbagai sektor baik hulu maupun hilir
- Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

di dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan.

anggaran pada belanja Bantuan Transportasi Narasumber serta peserta kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa 186.456.285,- atau (94,54%), serta realisasi fisik tercapai 100%. 197.217.200,- dan dapat direalisasikan keuangan sebesar Rp. kegiatan Koordinasi dan Misi Investasi ini adalah sebesar Rp. 3. **Kerjasama Promosi dan Misi Investasi**, dukungan anggaran untuk

pedoman bagi pengambil kebijakan.

- Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah sebagai bahan dan Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat.

- Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1 dokumen tentang Barat.

kinerja yang dibebankan kepada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Provinsi karena realisasi penanaman modal merupakan salah satu terlaksananya Konsolidasi Data Realisasi Penanaman Modal kebijakan daerah mengenal penanaman modal serta untuk perencanaan, pengembangan, pengendalian dan penyusun Buku Data Perkembangan Modal Sumatera Barat sebagai dasar penanaman modal yang *up to date* dan informatif bagi pengguna adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS USAHA	MINAT KERJASAMA	ALAMAT/ HANDPHONE
1.	YULISA BEDSHET	FASHION BEDSHET DAN LENAN RUMAH TANGGA	FASHION BEDSHET DAN LENAN RUMAH TANGGA	PERUMNAS BELIMBING 085342629595
2.	APRILDA SUMTUMBUL	SULAMAN	SULAMAN	SOLOK SELATAN 085375536009
3.	ATILLA MAJIDI	KOPI	KOPI DAN OLAHAN KOPI	SANGIR SOLOK 082284450068
4.	AISYAH SULAMAN	SULAMAN	SULAMAN	BANUHAMPU AGAM 082387500488

menunjukkan keseriusannya untuk, yaitu:

Adapun calon investor yang menyatakan minat dan sebesar 125% dari target 8 calon investor yang ditetapkan. sebanyak 8 calon investor. Dengan capaian kinerja fisik Investor serta calon investor yang menyatakan minat investasi yang difasilitasi kelokasi rencana investasi sebanyak 2 calon kabupaten/kota serta calon investor jumlah calon investor

- Terlaksananya koordinasi promosi dan misi investasi dengan

➤ Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

kebutuhan.

- Memfasilitasi misi investasi dari luar ke Sumatera Barat dalam bentuk koordinasi, pendampingan maupun pertemuan sesuai yang berniat ke daerah tempat tujuan rencana investasi.
- Memfasilitasi para pengusaha/calon investor/dunia usaha

Sumatera Barat dan Calon Investor.

dilakukan baik dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se

5.	SAGA LESTARI	- RENDANG - CETAK BATAKO SEMEN	- RENDANG - CETAK BATAKO SEMEN	LAST AGAM 085263048132
6.	LAURA KSU PULAU HARAPAN	- PENGOLAHAN IKAN - PENGOLAHAN MAKANAN	- PENGOLAHAN IKAN - PENGOLAHAN MAKANAN	TANJUNG RAYA AGAM 085376295966
7.	PT MINANG KAYO ABADI	KULIT	KULIT	PADANG PANJANG 081270238823
8.	KOPI PAK DAB	KOPI	KOPI	LUNANG PESISIR SELATAN 085363492945

4. **Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal,**

dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 141.615.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 140.701.500,- atau (99,35%). Untuk realisasi fisik dari kegiatan ini tercapai sebesar 100%.

- Maksud dan tujuan dari Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah melakukan dan mengikuti pertemuan Koordinasi Kelembagaan Investasi Daerah dalam lingkup Provinsi dan Nasional untuk bertukar Informasi serta mencari Solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan kegiatan investasi daerah.
- Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi program/kegiatan penanaman modal pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek

perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh rumusan rekomendasi terkait permasalahan/kendala dibidang perencanaan dan kebijakan, promosi, pengendalian dan pembinaan penanaman modal serta pelayanan perizinan tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hasil kegiatan ini adalah terciptanya harmonisasi perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional sebanyak 4 rumusan terkait perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal.

- Koordinasi dan kerja sama aktif dalam penyediaan data dan informasi terkait penanaman modal dan sumbangsih pemikiran lainnya antar bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan.

- 5. Gelar Potensi dan Temu Usaha,** dukungan anggaran untuk kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha ini adalah sebesar Rp. 554.963.300,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 551.505.695,- atau (99,10%), sedangkan realisasi fisiknya sebanyak 10 calon investor atau tercapai 142,86%, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 7 calon investor.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:

- Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka mempromosikan sektor unggulan sebagai peluang investasi dalam suatu pertemuan dengan para calon investor.
- Menarik minat calon investor untuk melakukan kegiatan investasi di Sumatera Barat.

Penyelenggaraan dari kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha adalah merupakan kegiatan pertemuan koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi bersama Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi peluang investasi dengan para pengusaha perantau Minang, Asosiasi yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi, calon investor baik nasional maupun internasional.

Kegiatan ini telah melakukan fasilitasi kepada calon investor yang pelaksanaan bersamaan dengan pelaksanaan Sumbar Expo di Medan.

- Keluaran dari kegiatan ini dapat dilaksanakan dan dapat dicapai sesuai target yaitu 1kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 100 orang dimana pelaksanaannya bersamaan dengan pelaksanaan Sumbar Expo di Medan yang menghadirkan 4 narasumber dari kabupaten/kota,
- Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketertarikan beberapa calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat, yakni:

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Minat Kerjasama
1	2	3	4
1.	Mayra Andrea (Indonesia Jordan Business Council) IJBC	IJBC	Kopi dan Maining
2.	I Gede Hasan	Travel	Wisata Kuda
3.	A.A. Gym	Pendidikan	Pendidikan Islami
4.	Joy	Pupuk	Industri Hilir Pupuk Organik
5.	Putrama Alkhairi	Pupuk	Industri Hilir Pupuk Organik
6.	PT. Nusantara Siana eEco Solusi	Energi Efisiensi dan Energi Terbarukan	Pengolahan Sampah menjadi Methanol
7.	Lewu Itah Organization	Obat-Obatan	Minyak Atsiri
8.	GTA LINH	Travel	Pariwisata
9.	Eric James	Energy	Geothermal, Hydropower dan Energy Development
10.	Che Maziah Hamid	Travel	Tours and Travel

6. Promosi Investasi, dukungan anggaran untuk kegiatan Promosi Investasi ini adalah sebesar Rp. 2.550.656.320,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 2.527.953.950,- atau (99,10%) dan capaian fisiknya sebesar 115,79%. Kinerja keluaran hasil melebihi target yang direncanakan yakni 22 ivent promosi yang diikuti baik dalam negeri maupun luar negeri dari 19 ivent promosi yang diikuti baik dalam negeri maupun luar negeri yang direncanakan.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan Promosi Investasi ini adalah agar potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha/investor sehingga menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan investasi. Disamping itu juga untuk menarik minat calon investor yang ingin berinvestasi serta membangun citra yang dapat menimbulkan kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan yang menguntungkan.
- Keluaran dan outputnya dari kegiatan Promosi Investasi terlaksananya keikutsertaan Sumatera Barat dalam 22 ivent promosi baik dalam dan luar negeri berupa forum dan business

meeting. Calon investor yang menyatakan ketertarikannya untuk menanamkan investasinya di Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Minat Kerjasama
1	2	3	4
1.	Kishi Group	Penelitian dan Pengembangan Sintetis, di Berbagai Bidang Usaha Lain	Pengolahan Limbah Medis dan Rumah Tangga, Peternakan dan Perikanan
2.	Enersel Engine Company	Energy, Engine	Renewable Energy
3.	Centunion	Konstruksi Energy, Chemical dan Pengolahan Makanan	Proyek Infrastruktur
4.	AsFin (Emerging Markets Advisors	Perbankan, Hotel dan Pertanian	Data Investasi Publik
5.	Global World Energy OY	Energy	Pengolahan Limbah dan Ikan
6.	Bucharest	Kesehatan	Pencegahan Kanker
7.	OAV (German Asia – Pasific Business Association)	Pariwisata dan Energy	Geopark, Kawasan Wisata Bahari dan Industri Hilir Minyak Atsiri
8.	Shwe Taung Development Co. Ltd	Perhotelan	Perhotelan dan Industri Hilir (Rokok)
9.	Tomo Engineering	Energy	Kelapa Sawit, Bio Energy, Minyak dan Gas
10.	Power Energy	Energy	Solar Energy
11.	Lewu Itah Organization	Minyak Atsiri	Hilir Minyak Atsiri
12.	GTA LINH Travel	Travel	Pariwisata
13.	Zenith Real Estate Group	Wisata	Pariwisata
14.	Eric James Company	Energy	Geothermal, Hydropower, Energy Development
15.	Civil Service College Singapore	Perguruan Tinggi	Investasi Pendidikan
16.	Akmaziah Mobility Travel	Tour and Travel	Pariwisata
17.	Tour SDN BHD	Tour and Travel	Pariwisata
18.	Pound (Thailand)	Perkebunan	Kopi
19.	Mousa	Perkebunan	Jahe dan Makanan
20.	Arie (Jawa)	Energy	Pembangkit Listrik Tenaga Surya

- 7. Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi,** dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi ini adalah sebesar Rp. 37.584.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 33.612.000,- atau (89,43%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa anggaran pada belanja

honorarium tenaga ahli/Instruktur/narasumber, Belanja Bantuan Transportasi Narasumber di dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Pertemuan Strategi Promosi Peluang Investasi ini adalah pertemuan DPM & PTSP Provinsi dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang menghadirkan Narasumber dari BKPM RI terkait bagaimana koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara BKPM RI dengan DPM & PTSP Provinsi dan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, membahas berbagai permasalahan dan solusi terkait investasi di Sumatera Barat serta strategi promosi yang tepat sesuai dengan kondisi setiap daerah di Sumatera Barat.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi kegiatan ke Kab/kota, antara lain :

- Kab. Pesisir Selatan tgl. 14 s.d 15 Mei 2019
- Kab. Sijunjung tgl. 21 s.d 22 Mei 2019
- Kab. 50 Kota tgl. 22 s.d 23 Agustus 2019
- Kab. Agam tgl. 27 s.d 28 Agustus 2019
- Kab. Padang Pariaman tgl. 11 September 2019

- 8. Forum Investasi Sumatera Barat**, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 115.301.800,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 102.808.450,- atau (89,16%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kurangnya realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa anggaran pada belanja honorarium tenaga

ahli/Instruktur/narasumber, Belanja Bantuan Transportasi Narasumber di dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan.

➤ Maksud dari kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat yaitu sebagai wujud tanggung DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat untuk menyelesaikan permasalahan investasi sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan juga akhirnya akan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat dan dapat membantu para investor agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan yang berarti.

➤ Tujuan kegiatan adalah untuk mengakomodir segala permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan, DPM & PTSP Provinsi, Kab/Kota dalam menghadapi permasalahan investasi dan sebagainya untuk dicarikan solusi pemecahannya.

➤ Hasil Penyelenggaraan Forum Investasi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan tema " Peluang – peluang Investasi di sektor Industri di Sumatera Barat ", diperoleh rumusan sebagai berikut :

a. Perlunya percepatan pelayanan perizinan dimana adanya perubahan sistem untuk mempercepat pelayanan perizinan bagi investor, termasuk izin di sektor industri .

b. Perlunya membuat forum yang mempertemukan calon investor dan pelaku usaha.

- c. Adanya permasalahan investasi seperti permasalahan perizinan, permasalahan lahan dan permasalahan yang berhubungan dengan deregulasi/kebijakan dapat diselesaikan dengan adanya Online Single Submission (OSS)
- d. Harus adanya jaminan Pemerintah untuk pemasaran, hal ini di perlukan untuk penyemangat petani lebih bergairah.
- e. Sektor industri termasuk salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian.

9. Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi, mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 165.672.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 163.170.870,- atau (98,49%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kegiatan ini dimaksudkan memberikan alternatif yang tepat dalam berinvestasi dimana dilakukan study kelayakan teknis, pasar dan finansial agar dapat memberikan informasi mengenai kelayakan teknis atas pasar, finansial di Provinsi Sumatera Barat bagi Investor. Khusus untuk Tahun 2019 Study yang dilakukan adalah pada sektor industri Minyak Nilam di Pasaman Barat. Dan Tujuan kegiatan ini adalah mengoptimalkan penghasilan petani serta meningkatkan taraf hidupnya.

10. Penyelesaian Permasalahan Investasi, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi ini adalah sebesar Rp. 60.451.600,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi sebesar Rp. 58.450.140,- atau 96,69%, serta capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran kegiatan Penyelesaian

Permasalahan Investasi sesuai target yang direncanakan yaitu 6 perusahaan PMA dan PMDN.

Maksud dari kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Sumatera Barat, dan DPM&PTSP Prov. Sumbar beserta DPM&PTSP di Kabupaten/Kota merupakan OPD yang bertanggung jawab atas keamanan dan nyaman kegiatan investasi PMA/PMDN yang menjadi kewenangan masing-masing yang diharapkan dapat membantu para penanam modal agar dapat merealisasikan investasinya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan atau kendala yang berarti.

Tujuan kegiatan adalah agar permasalahan investasi yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMDN/PMA di Kabupaten/Kota khususnya di Sumatera Barat pada umumnya dapat difasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu Tim koordinasi penanaman modal yang melibatkan OPD/Instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

➤ Keluaran atau output dari kegiatan ini:

1. Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat yang difasilitasi permasalahan dalam Penanaman Modal sebanyak 6 Perusahaan PMA/PMDN.
2. Dari 6 perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya semuanya dapat diselesaikan.

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1	2	3
1.	CV. Batu Tongga	Pertambangan Batuan
2.	PT. Spectra Sun Energy	Pertambangan Batuan
3.	PT. Taruko Putra Nusantara	Pertambangan Batuan
4.	CV. Putra Karya Mandiri	Pertambangan Batuan
5.	PT. Dempo Sumber Energy	PLTMH
6.	Iswindiarti (Perseorangan)	-

- Hambatan didalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada yang berarti, namun dukungan anggaran untuk penyelesaian permasalahan investasi sangat dibutuhkan.

11. Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat ini adalah sebesar Rp. 145.357.000,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat sebesar Rp. 142.563.920,- atau 98,08%, serta capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat sesuai dengan target yang direncanakan.

- Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan data dan informasi peluang investasi prioritas Sumatera Barat. Serta tujuan kegiatan ini adalah menyusun profil peluang investasi yang akan ditawarkan ke investor, identifikasi kondisi objektif potensi investasi secara akurat dan layak ditawarkan kepada investor serta mengetahui kelayakannya.
- Keluaran dari kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi Sumatera Barat ini adalah tersusunnya buku profil dan peluang

investasi Provinsi Sumatera Barat dengan hasil cetakan sebanyak 450 buah buku.

Adapun hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan presentasi tentang peluang investasi yang ada di Sumatera Barat yang akan ditawarkan kepada calon investor serta materi promosi investasi.

12. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal,

dukungan anggaran untuk kegiatan ini di tahun 2019 adalah sebesar Rp. 42.100.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar 92,01% atau sebesar Rp. 38.734.200,-.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal ini adalah memperkenalkan dan mempromosikan Sumatera Barat kepada seluruh pihak baik dalam dan luar negeri serta memberikan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang ada di Sumatera Barat agar diketahui oleh Investor sehingga nantinya menjadikan Sumatera Barat menjadi tujuan investasi.
- Keluaran dari kegiatan ini adalah penyebarluasan informasi tentang penanaman modal yang terjadi di Sumatera Barat melalui Media baik Nasional maupun lokal serta media elektronik dan digital.

13. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal,

dukungan anggaran untuk kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal ini adalah sebesar Rp. 83.180.900,-. Dan capaian

realisasi keuangan kegiatan ini mencapai Rp. 79.894.200,- atau (96,05%), dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.

- Maksud dan tujuan dari kegiatan updating sistem informasi spasial penanaman modal ini adalah merupakan salah satu kegiatan dalam membantu mendorong pengembangan dan penyempurnaan penyelenggaraan sistem informasi spasial penanaman modal yang lebih diarahkan pada pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam, penataan data dan informasi yang meliputi potensi dan peluang investasi, pembangunan dan pengembangan basis data spasial serta terwujudnya jaringan sistem informasi pada tingkat regional/provinsi yang terdiri dari peta kesesuaian lahan, status hutan dan peta investasi existing.
- Keluarannya adalah membuat peta dan database serta sistem informasi spasial sebanyak 1 sektor yakni di sektor pariwisata.
- Hasil (outcome) kegiatan ini adalah terupdatenya sistem informasi Spasial Penanaman Modal sebanyak 1 sektor.

14. Forum Komunikasi Pelaku Usaha Daerah, dukungan anggaran untuk kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini adalah sebesar Rp. 112.001.050,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 111.104.800,- atau (99,20%). Dan realisasi fisiknya sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100%.

- Maksud dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan untuk meningkat dan mengembangkan usaha dalam sebuah Forum Komunikasi Usaha Daerah diantara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan para pelaku usaha. Forum ini bertujuan untuk mencari solusi dan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha untuk menghadapi tantangan kendala dan hambatan dalam meningkatkan dan megembangkan dunia usaha di Sumatera Barat.
- Keluaran (output) dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini adalah terlaksananya forum komunikasi usaha daerah dengan jumlah peserta 100 orang.
- Hasil (outcome) dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah adalah adanya usulan dasar rekomendasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi daerah tentang kemitraan Usaha di kalangan pelaku usaha di daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan kegiatan:

- 1. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi,** dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 406.740.400,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 390.378.480,- (95,98%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi dilaksanakan

untuk mendukung kemudahan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP serta pelayanan secara elektronik dengan didukung komputer jaringan dan perangkat komputer yang baik yang diharapkan mempercepat penyelenggaraan perizinan kepada masyarakat.

2. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 115.579.780,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 114.369.400,- atau sebesar (98,95%), sedangkan realisasi fisiknya melebihi target yang ditetapkan sebesar 140% dari 15 permasalahan perizinan yang ditargetkan dapat direalisasikan sebanyak 21 permasalahan perizinan. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu dilaksanakan terkait laporan permasalahan yang muncul dalam pelayanan perizinan yang dilakukan dalam bentuk mediasi terhadap pengaduan izin yang bermasalah.

- Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi disaat investor mengurus perizinan yang ada di bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan tumbuhnya ekonomi Sumatera Barat dengan mensukseskan investasi Sumatera Barat dimana salah satunya adalah dengan memfasilitasi investor dalam percepatan pengurusan izin dimaksud.

- Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi dan mediasi permasalahan pengurusan izin dari 15 yang ditargetkan dapat difasilitasi sebanyak 21 permasalahan
- Dan Hasil dari kegiatan ini adalah termediasinya permasalahan dalam pengurusan perizinan yang dilakukan oleh calon investor.

3. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan

Perizinan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 155.096.240,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 147.680.600,- (95,22%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dilaksanakan bertujuan untuk :

1. Mengsinkronkan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan dan standar pelayanan dan standar operasional pelayanan;
2. Menghimpun berbagai masalah dan mencari pemecahannya; dan,
3. Mengevaluasi perkembangan dari pelimpahan kewenangan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan.

4. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.176.886.900,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 1.146.095.086,- atau (97,38%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dilaksanakan

untuk 660 orang pelaku usaha, tokoh masyarakat, KAN, LKAAM, Camat, Walinagari dan aparatur DPM & PTSP kabupaten/kota se Sumatera Barat yang dilaksanakan dalam beberapa angkatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan adanya perizinan cepat, mudah, transparan dan pasti;
- Sarana pembelajaran dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, kesejahteraan sehingga masyarakat mau dan mapu berperan serta dalam setiap program pemerintah.

5. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 326.573.500,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 320.109.335,- atau (98,02%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dilakukan 2 kali dalam tahun 2019 sesuai dengan evaluasi Menpan. Dari 2 kali pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan diperoleh kinerja unit pelayanan “ **Sangat Baik** ” dengan interval nilai kumulatif sebesar **81,75**. Dan setelah dikonversikan didapatkan nilai akumulasi IKM sebesar **3,27**.

Kinerja dari Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan sebesar **97,61%** dibandingkan dengan target sebesar **3,35**.

Faktor yang menghambat pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain :

1. Help Desk (meja pengaduan) yang tidak tersedia dan mudah dilihat pada ruang tunggu layanan;
2. Petugas Pengaduan yang tidak standby (berada setiap hari) di ruang layanan;
3. Kompetensi petugas di FO yang masih kurang, yang seharusnya PNS yang sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan di posisi FO;
4. Petugas Administrator dan Pengawas yang tidak berada diruangan layanan selama waktu pelayanan;
5. Tim Teknis PTSP yang masih berkantor di OPD teknis masing-masing.

6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.003.193.750,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 2.000.628.258,- atau (99.87%) sedangkan untuk realisasi fasilitas penerbitan izin dan non izin yang ditargetkan melampaui realisasinya 3.174 izin/non izin dari 1.500 izin/non izin yang ditargetkan atau sebesar 211,60%, dan untuk penyelesaian izin/non izin sesuai dengan SOP adalah sebesar 82,51% dari target sebesar 82% atau sebesar 100,62%.

- Maksud dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat.

- Tujuan dari kegiatan pelaksanaan Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP) adalah untuk membantu masyarakat / pelaku usaha / investor / penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi mengenai penanaman modal.

Ruang lingkup kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan bagi perusahaan/perorangan yang berlokasi di Sumatera Barat, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Melayani permohonan perizinan berusaha sesuai kewenangan;
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dari si pemohon;
3. Melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan yang diajukan pemohon;
4. Melakukan peninjauan lapangan, koordinasi dan rapat dengan instansi terkait bila diperlukan;
5. Melaksanakan proses permohonan perizinan penanaman modal melalui SPIPISE dan OSS;

6. Melaksanakan proses permohonan perizinan Sektor Perdagangan berupa Angka Pengenal Impor (API) umum maupun produsen yang berbasis Website (internet); dan

7. Menerbitkan dokumen perizinan berusaha.

➤ Keluaran Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) keluaran yaitu:

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP tahun 2019 telah diterbitkan izin dan non izin sebanyak 3.174 izin/rekomendasi melampaui target sebesar 211,60% (target: 1.500 izin/rekomendasi).

➤ Hasil dari kegiatan yaitu persentase perizinan penanaman modal yang diterbitkan tepat waktu dapat terealisasi sebesar 82,51% atau sebesar 100,62% (target 82%).

7. Penilaian Standar Mutu Perizinan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 34.285.000,- atau sebesar (97,96%), sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Kegiatan Penilaian Standar Mutu Perizinan tahun 2019 dilaksanakan terkait untuk Surveillance Manajemen Mutu SNI ISO dari 9001:2008 menjadi 9001:2015 yang berlaku sampai dengan 01 Agustus 2021.

Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

dengan kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi bidang Penanaman Modal. Kegiatan ini memfasilitasi mekanisme persuratan, mulai dari surat masuk hingga surat keluar.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 27.333.846,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.199.698 atau capaian kinerja keuangan 84,88%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengelolaan surat menyurat kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan suatu pemenuhan dasar akan kebutuhan listrik, telepon dan internet melalui jasa pihak ketiga yang menyediakannya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 171.720.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 168.769.888,- atau capaian kinerja keuangan 98,28%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan listrik, telpon, air dan jaringan internet, SIPKD dengan capaian kinerja 100%.

3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor merupakan suatu pemenuhan dasar akan kebutuhan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor melalui jasa pihak ketiga yang menyediakannya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor sebesar Rp. 539.454.079,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 539.281.029,- atau capaian kinerja keuangan 99,97%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor dengan capaian kinerja 100%.

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ini dilakukan untuk menunjang seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dilaksanakan melalui pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 40.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 39.975.350,- atau capaian kinerja keuangan 99,94%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dengan capaian kinerja 100%.

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan melalui pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 30.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 29.905.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,68%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya barang-barang cetak seperti kertas kop, map, amplop, dan lain-lain, serta tersedianya biaya

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan lebih baik.

Badan Kepegawaian Daerah. Dengan bertambah wawasan aparatur, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur pada Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah

Undangan

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

untuk penerangan bangunan kantor, dengan capaian kinerja 100%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya alat-alat dan komponen listrik capaian kinerja keuangan 99,97%.

Rp. 13.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 12.996.500,- atau komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang tertuang pada Dokumen penggantian komponen-komponen instalasi listrik. Alat-alat listrik Kantor adalah dalam rangka menunjang aktivitas perkantoran melalui Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

pengandaan untuk pelaksanaan kegiatan DPM & PTSP yang akan menunjang pelayanan administrasi perkantoran, dengan capaian kinerja 100%.

17.160.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 16.250.000,- atau capaian kinerja keuangan 94,70%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya untuk langganan surat kabar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur, dengan capaian kinerja 100%.

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang didasarkan kepada surat perintah tugas dalam rangka menghadiri undangan rapat/workshop maupun koordinasi dan konsultasi dengan instansi dalam daerah maupun luar daerah.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah sebesar Rp. 492.840.700,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 492.211.792,- atau capaian kinerja keuangan 99,87%.

Dari kegiatan ini tersedia dana untuk pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan urusan bidang Penanaman Modal, sedangkan untuk capaian kinerja adalah sebesar 100%.

9. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur sebesar Rp. 15.450.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 13.250.000,- atau capaian kinerja keuangan 85,76%.

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pelaksanaan senam dan wirid untuk PNS di Lingkungan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat. Rendahnya capaian realisasi pelaksanaan kegiatan ini karena tidak tercairkannya makanan dan minuman senam bersama lintas OPD (undangan dari Dispora tidak ada).

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman adalah dalam rangka menunjang seluruh kegiatan pada DPM & PTSP. Penyediaan makanan dan minuman disediakan terhadap pelaksanaan rapat-rapat rutin ataupun rapat koordinasi dengan tamu.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 29.952.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 29.755.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,34%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya makan minum untuk penyelenggaraan rapat-rapat rutin kantor dalam rangka pelaksanaan urusan bidang penanaman modal, dengan capaian kinerja 100%.

11. Pengadaan Meubeleur

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Meubeleur sebesar Rp. 26.700.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 26.592.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,60%.

Pada Tahun 2019 DPM & PTSP melakukan pengadaan 10 (sepuluh) unit kursi rapat, 10 (sepuluh) unit kursi Front Office, 5 (lima) unit kursi ruang tunggu.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengadaan meubelier kantor dengan capaian kinerja 100%.

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 50.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 49.950.500,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,90%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 155.657.261,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 149.928.778,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,32%, realisasi keuangan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sesuai dengan kebutuhan selama tahun berjalan.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas (8 unit mobil dan 3 unit motor) selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.

52.900.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 51.675.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 97,68%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan danperlengkapan kantor selama 1 tahun, dengan capaian Kinerja 100%.

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur sebesar Rp. 9.385.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 9365.500,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 77,78%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan Meubeleur selama 1 (satu) tahun, dengan capaian Kinerja 100%.

16. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 305.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 300.281.450,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 98,45%.

Dari kegiatan ini diperoleh pengadaan 4 (empat) unit Dual Mobile Roll O Pack, 2 (dua) unit AC 2 PK, 7 (tujuh) unit Personal Komputer, 3 (tiga) unit Laptop, 1 (satu) unit Printer A3, 6 (enam) unit Printer A4/F4, 5 (lima) unit Scanner yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan DPM & PTSP, dengan capaian kinerja 100%.

17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kedinasan.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya sebesar Rp. 44.460.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 44.460.000,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 100%.

18. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 977.974.300,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 905.923.540,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92,63%.

Kegiatan ini telah melakukan pengiriman PNS pada DPM & PTSP untuk mengikuti Bimtek Penanaman Modal dan PTSP ke BKPM RI, Kemendagri, dan pelatihan pengadaan barang dan jasa. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya profesional PNS di bidangnya, dengan capaian kinerja 100%.

19. Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan SKPD adalah berupa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021, Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja

Tahunan (RKT), RKA, DPA dan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan SKPD sebesar Rp. 54.790.160,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 53.366.834,- atau dengan capaian Kinerja keuangan adalah sebesar 97,40%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran pada BKD seperti Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA dan DPPA, dengan capaian Kinerja 100%.

20. Penatausahaan Keuangan SKPD

Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD adalah kegiatan rutin yang disediakan berupa penatausahaan keuangan pada DPM & PTSP.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD sebesar Rp. 226.994.750,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 220.243.800,- atau dengan capaian Kinerja keuangan sebesar 97.03%.

Dana kegiatan ini digunakan untuk honorarium pengelola kegiatan dan keuangan (PA, KPA, Bendahara, PPK, PPTK dan Pembantu Bendahara).

Hasil dari kegiatan ini terwujudnya pengelolaan keuangan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan output berupa laporan keuangan akhir tahun, semester dan bulanan yang menghasilkan capaian Kinerja 100%.

Berdasarkan pagu anggaran pada Perjanjian Kinerja DPM & PTSP Tahun 2019 sebesar Rp. 12.189.686.025,- dengan realisasi anggaran

adalah sebesar Rp. 11.946722.876,- dengan capaian kinerja keuangan adalah sebesar 98,01%.

21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah berupa penyusunan laporan capaian kinerja bulanan dan triwulan, penyusunan Penetapan Kinerja (PK), penyusunan bahan LKPJ Gubernur, LPPD dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta laporan capaian kinerja lainnya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp143.945.600,- dan dapat direalisasi sebesar Rp140.910.000,- atau dengan capaian kinerja keuangan adalah sebesar 97,89%.

Hasil dari kegiatan ini tersedianya laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%. Rendahnya realisasi keuangan pelaksanaan kegiatan ini karena terdapat sisa anggaran dari belanja honorarium operator Simbangda.

22. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD adalah evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan serta laporan capaian kinerja lainnya.

Adapun dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD sebesar Rp. 35.303.900,-

dan dapat direalisasi sebesar Rp. 35.203.550,- atau dengan capaian kinerja keuangan adalah sebesar 99,72%.

Hasil dari kegiatan ini terpantaunya progress pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun, dengan capaian kinerja 100%.

23. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD sebesar Rp. 121.938.573,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 119.878.078,- atau capaian kinerja keuangan sebesar 98,31%. Hasil dari kegiatan Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD ini adalah tersusunnya laporan pengelolaan aset semester dan tahunan

Bab ini secara umum menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran Tahun 2019 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan realisasi program kegiatan bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (integrated and consolidated report) terhadap pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja dari bidang-bidang dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bidang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Lima Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021. Program tersebut adalah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat telah menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
3. Pada sasaran strategis **Meningkatnya Realisasi Investasi di Sumatera Barat** capaian kinerja termasuk pada katagori **"Sangat Baik" atau rata-rata 121,51%**, artinya bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia aparatur di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui program dan kegiatan berjalan dengan baik.
4. Pada sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu** capaian kinerja termasuk kategori **"Baik" atau rata-rata 99,12%**, ini berarti upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Terpadu Satu Pintu berhasil baik.

5. Pada sasaran strategis **Meningkatnya Tata Kelola Organisasi** capaian kinerja termasuk pada katagori **"Baik" atau rata-rata 100%**, ini berarti upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan tata kelola organisasi berhasil dengan baik.
6. Pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan yang berdasarkan pada pencapaian sasaran strategik RPJMD adalah sebesar **99,21%**.

Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif segenap semua bidang dan instansi yang terkait sangat diharapkan dalam mendukung program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang akan mendatang.

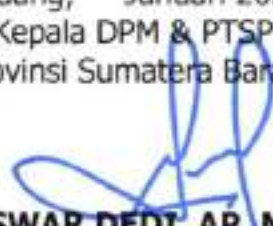
4.2 SARAN

Dalam rangka untuk peningkatan capaian kinerja, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlu optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Barat.

2. Perlu upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan antara lain melalui:
- a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan program kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Peningkatan sarana prasarana yang mana merupakan pendukung pencapaian tujuan organisasi
 - d. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi dengan instansi pusat dan daerah terkait tugas dan fungsi.

Padang, Januari 2020
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat,



MASWAR DEDI, AP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAFTAR PENGHARGAAN / PRESTASI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	NAMA PENGHARGAAAN	TINGKAT NASIONAL	TINGKAT PROVINSI	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Penilaian SKPD Terinovatif Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	SKPD Terinovatif Tingkat Provinsi Sumatera Barat	-	PERINGKAT III SKPD TERINOVATIF	
2.	Penilaian Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Kemenpan RB RI	Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Tingkat Nasional	Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori " Baik " Tahun 2019		
3.	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Se - Sumatera Barat Tahun 2019 oleh Komisi Informasi Sumatera Barat	Organisasi Perangkat Daerah sebagai Badan Publik Cukup Informatif Kategori Organisasi Perangkat Daerah	-	Organisasi Perangkat Daerah sebagai Badan Publik Cukup Informatif	

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDI, AP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
REALISASI INVESTASI PMA
TAHUN 2019

No	Nama Perusahaan	Cetak Bidang Usaha	Kabkot	Negara	No Izin	TOTAL		
						Tambahan Investasi (Dalam US\$, Ribu)	TKI	TKA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PADANG RAYA CAKRAWALA	Industri pemisahan/fraksinasi minyak bumi kelapa sawit	Kota Padang	Singapura	5475/1/IP/PMA/2017	10.025,10	0	0
2	ANDALAS WAHANA BERJAYA	Industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil), Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Kabupaten Dharmasraya	Malaysia	1137/1/PI/PMA/2018	3.914,40	733	0
	ANDALAS WAHANA BERJAYA	Industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil), Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Kabupaten Dharmasraya	Malaysia	1137/1/PI/PMA/2018	81,90	0	0
	ANDALAS WAHANA BERJAYA	Industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil), Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Kabupaten Dharmasraya	Malaysia	1137/1/PI/PMA/2018	283,80	0	0
	ANDALAS WAHANA BERJAYA	Industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil), Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Kabupaten Dharmasraya	Malaysia	1137/1/PI/PMA/2018	27,60	0	0
	ANDALAS WAHANA BERJAYA	Industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil), Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Kabupaten Dharmasraya	Malaysia	1137/1/PI/PMA/2018	4,80	0	0
3	PINANG SAKTI INDONESIA	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	Kabupaten Lima Puluh Kota	R.R. Tiangkok	8120212182162	666,70	30	0
4	BARRENJOEY INDONESIA	Jasa transportasi wisata	Kota Padang	Australia	5483/1/IP/PMA/2017	437,80	1	0
5	HITAY DAYA ENERGY	Pengusahaan tenaga panas bumi	Kabupaten Solok	Singapura	3036/1/IP/PMA/2017	402,90	0	0
6	KHATULISTIWA INDAH PERMAI	ANGKUTAN LAUT	Kota Padang	Australia	8120016092943	660,00	6	0

7	BERKAT SAWIT SEJAHTERA	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM	Kabupaten Pasaman Barat	Malaysia	9120002201486	254,40	230	0
	BERKAT SAWIT SEJAHTERA	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	Kabupaten Pasaman Barat	Malaysia	9120002201486	2.909,10	86	0
8	PRIMATAMA MULIAJAYA	Perkebunan kelapa sawit	Kabupaten Pasaman Barat	British Virgin Islands	283/T/PERTANIAN/2005	202,70	0	0
9	KEMILAU PERMATA SAWIT	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM	Kabupaten Sijunjung	Malaysia	9120003271384	162,50	230	0
	KEMILAU PERMATA SAWIT	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	Kabupaten Sijunjung	Malaysia	9120003271384	7.598,40	90	0
	KEMILAU PERMATA SAWIT	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	Kabupaten Pesisir Selatan	Malaysia	9120003271384	3.488,70	0	0
	KEMILAU PERMATA SAWIT	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM	Kabupaten Pesisir Selatan	Malaysia	9120003271384	7,70	0	0
10	KUREBA ERIICHI	Jasa konstruksi jaringan saluran listrik dan telekomunikasi lainnya	Kabupaten Padang Pariaman	Jepang	180/1/IP/1/PMA/2013	100,00	0	0
11	AWERA MANA ISLAND	Penyediaan akomodasi dan Wisata tirta	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	5145/1/IP/PMA/2017	100,00	0	0
12	AGRO MUKO	Tangki penyimpanan kelapa sawit	Kota Padang	Belgia	296/T/PERDAGANGAN/2007	382,00	0	0
	AGRO MUKO	Tangki penyimpanan kelapa sawit	Kota Padang	Belgia	453/1/IU/PMA/2016	73,20	23	0
13	XL AXIATA Tbk.	Telekomunikasi tanpa kabel	Kota Padang	Malaysia	7/1/IU-PP/PMA/2014	2.973,80	2	0
14	PLAYGROUND SURF RESORT	Penyediaan akomodasi	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Brasil	2928/1/IP/PMA/2017	66,70	0	0
15	BUNGUS LAUT BIRU	Wisata tirta	Kota Padang	Australia	3995/1/IP/PMA/2017	33,30	0	0
16	AMP PLANTATION	PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PENGOLAHANNYA	Kabupaten Agam	Singapura	570/21/T/PERTANIAN/BKPPM-D-2003	3.552,20	39	3
17	TELUK BAYUR BULK TERMINAL	JASA PERGUDANGAN	Kota Padang	Singapura	8120215001557	1.657,20	0	0
18	VFS TASHEEL INDONESIA	JASA AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR	Kota Padang	Belanda	8120003860062	19,60	1	0
19	DEMPO SEIBA HILL	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Kota Padang	Hongkong, RRT	2200/1/IP/PMA/2015	27,00	0	0
20	TANJUNG BOBLO MENTAWAI	Penyediaan akomodasi	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Afrika Selatan	3716/1/IP/PMA/2017	35,70	0	0

21	WEST PASAMAN POWER	Pembangkitan tenaga listrik	Kabupaten Pasaman Barat	Hongkong, RRT	440/1/IP/PMA/2017	6,80	0	0
22	HALABAN HIDRO ENERGI	Pembangkitan tenaga listrik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jerman	1747/1/IP/PMA/2016	42,30	0	0
23	SING PELLET RESOURCES INDO	Pengusahaan hutan lainnya	Kabupaten Sijunjung	Singapura	2490/1/IP/PMA/2016	4,40	0	0
24	DEMPO KARYA BERSAMA	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Kota Padang	Hongkong, RRT	2715/1/IP/PMA/2014	13,90	0	0
25	TELOS ISLAND ADVENTURE	Aktivitas biro perjalanan wisata	Kota Padang	Inggris	1875/1/IU/PMA/2017	2,10	0	0
	TELOS ISLAND ADVENTURE	Aktivitas biro perjalanan wisata	Kota Padang	Inggris	9120001462518	3,80	3	1
26	PERKEBUNAN PELALU RAYA	Industri minyak makan dari nabati dan Perkebunan kelapa sawit	Kabupaten Agam	Malaysia	1452/1/IU/PMA/2016	2,20	0	0
27	SIBON PRAYA SUMATRA	ANGKUTAN LAUT	Kota Padang	Brasil	8120205792355	1,30	1	1
28	PERMATA EMERALD INDAH	Perdagangan besar	Kota Padang	Korea Selatan	3566/1/IP/PMA/2017	3,50	0	0
29	DEMPO SUPER DRAGON	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Kota Padang	Hongkong, RRT	3677/1/IP/PMA/2016	0,10	0	0
30	INCASI RAYA	Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan pengolahannya menjadi industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati	Kabupaten Pesisir Selatan	Hongkong, RRT	536/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2007	-	1030	1
	INCASI RAYA	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	Kabupaten Dharmasraya	Hongkong, RRT	8120115100025	-	2038	3
	INCASI RAYA	Industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian dan pengemasan R&D	Kota Padang	Hongkong, RRT	152/1/IU-PL/PMA/2015	-	153	0
31	TOM CURREN RESSORT MENTAWAI ISLAND GROUP	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Amerika Serikat	8120016102806	-	0	1
32	SIBON EXPLORER SUMATRA	Jasa transportasi wisata	Kota Padang	Brasil	1103/1/IU/PMA/2018	-	7	0
	SIBON EXPLORER SUMATRA	Jasa transportasi wisata	Kota Padang	Brasil	8120001761069	-	7	2
33	JAYA TENGGIRI	KEGIATAN OLAHRAGA (Wisata tirta berupa menyelam dan selancar)	Kota Padang	Australia	9120006131753	20,10	22	2
34	SUPREME ENERGY MUARA LABOH	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	Kabupaten Solok Selatan	Belanda	8120107872939	71.546,90	2150	10

35	SUMBAR ANDALAS KENCANA	PLANTATION (PERKEBUNAN K.SAWIT & INDUSTRI PENGOLAHANNYA (CPO) , INTI SAWIT	Kabupaten Sijunjung	Hongkong, RRT	298/T/KEHUTANAN/1998	19.854,50	0	0
	SUMBAR ANDALAS KENCANA	Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan pengolahannya menjadi industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati	Kabupaten Pesisir Selatan	Hongkong, RRT	181/II/PMA/2005	95,10	0	0
36	RAJOLAR BROTHERS	Perdagangan besar	Kota Padang	India	945/1/II/PMA/2014	950,00	18	4
	RAJOLAR BROTHERS	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian	Kota Padang	India	9120307631092	0,50	0	2
37	ABASIAT RAYA	Industri karet remah (crumb rubber)	Kota Padang	Singapura	1525/1/II/PMA/2014	576,90	46	0
	ABASIAT RAYA	Industri karet remah (crumb rubber)	Kota Padang	Singapura	8120217011584	568,60	44	1
38	KENCANA SAWIT INDONESIA	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) Dan Minyak Goreng Kelapa Sawit	Kabupaten Solok Selatan	Singapura	570/04/T/PERTANIAN/BKPPM-D-2004	299,60	0	0
	KENCANA SAWIT INDONESIA	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) Dan Minyak Goreng Kelapa Sawit	Kabupaten Solok Selatan	Singapura	570/04/T/PERTANIAN/BKPPM-D-2004	495,60	0	0
	KENCANA SAWIT INDONESIA	Perkebunan Tanaman Buah-Buahan Penghasil Minyak	Kabupaten Solok Selatan	Singapura	570/04/T/PERTANIAN/BKPPM-D-2004	0,30	0	0
39	DREAM BEACH LAND	Penyediaan jasa akomodasi	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	2832/1/IP/PMA/2016	200,00	0	0
40	NASARA INTERNATIONAL PROJECTS	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	5240/1/IP/PMA/2017	17,40	0	0
41	MIA OCEAN LIFE	Penyediaan akomodasi	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	1142/1/IP/PMA/2017	17,80	0	0
42	SINGPELLET INDONESIA	Industri kayu bakar dan pelet kayu	Kabupaten Sijunjung	Singapura	345/1/IP/PMA/2014	3,10	0	0
43	BIOMASS FUEL INDONESIA	Perdagangan besar	Kota Padang	Malaysia	88/1/II/PMA/2015	-	8	0
44	BINTANG PARADISO RESORT	HOTEL (AKOMODASI)	Kabupaten Pesisir Selatan	Jerman	20/1/PARSENII/2000	17,80	6	3
45	SARIMELATI KENCANA	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING DAN PENYEDIAAN)	Kota Padang	British Virgin Islands	8120102820776	130,40	0	0

	SARWELATI KENCANA	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERENTU (EVENT CATERING DAN PENEDIAN)	Kota Bukittinggi	British Virgin Islands	81/20102820776		125,90	0	0	0
46	SELO KENCANA ENERGI	Pembongkai Listrik Mini Hidro	Kabupaten Solok Selatan	Belanda	416-1/21/2016003/2012		124,70	38		0
47	JRWANI MEGA POWER	Pembongkai Tenaga Listrik	Kabupaten Tanah Datar	Singapura	14821/1/P/PM/2013		20.478,60	3		0
48	ANDALAS ARGO INDUSTRI	Industri minyak makan dan lemak mabok	Kabupaten Pasaman	Malaysia	680/1/INDUS/BU/2005		1.231,40	0		0
49	GIANGGI HYDROELECTRIK KONSTRUKSI INDONESIA	INSTALASI SISTEM KEListRIKAN, AIR (IPPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI	Kota Padang	R.R. Tongkok	91/202000320747		26,10	12		0
50	SRI JANYA AGRO	PERDANGANGAN BESAR	Kota Padang	India	175A/1U/PM/2018		-	0		1
	SRI JANYA AGRO	Industri Bahan Kosmetik Dan Kosmetik, termasuk Pasta Gigi	Kabupaten Padang Pariaman	India	1408A/1U/PM/2018		39,90	5		1
51	WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION	PERDANGANGAN BESAR ATAS BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Kota Padang	Tongkong RRT	81/20104970733		-	0		4
52	MENTAWAI SURF CHARTERS	Wisata Tirta	Kota Padang	Brazil	2409/1/P/PM/2017		-	10		0
53	NOMAD SUMATERA INDONESIA	KEGIATAN OLAH RAGA	Kota Padang	Australia	91/20400450781		-	7		0
54	TOGATI NUSA RETREAT	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Kepulauan Mentawai	Selandia Baru	81/20311071473		-	12		0
55	USAIHA INI PADANG	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) Dan Minyak Goreng Kelapa Sawit	Kabupaten Padang Pariaman	Singapura	119/1U/PL/PM/2015		18,70	0		0
56	HITAY BALAI KABA ENERGY	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	Kabupaten Agam	Singapura	1658/1/P/PM/2016		0,40	0		0
57	FAVELA MENTAWAI CAMP	Resor esat yang dimiliki sendiri atau disewa	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Australia	91/20006172365		28,50	0		0
58	SAMUDRA WADAH HIBALA	Jasa Perjalanan wisata	Kota Padang	Brazil	242/1/1U/PM/2018		7,60	0		0
	SAMUDRA WADAH HIBALA	Aktivitas biro perjalanan wisata	Kota Padang	Brazil	91/20108170291		1,10	0		3
59	PRODIA WIDYAHUSADA TBK	Laboratorium klinik dan klinik	Kota Padang	Singapura	81/201104941143		6,80	29		0
60	GRAHAMAS CITRAWISATA	Hotel Bintang 4	Kota Bukittinggi	British Virgin Islands	91/20200581936		-	5		0

61	NUSA HUEY SENTOSA	Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, termasuk wisata	Kota Padang	Australia	8120007862568	-	6	1
62	NUSANTARA SELATAN RAYA	Aktivitas Pemecahan Film	Kota Padang	Singapore	9120308372951	-	9	0
63	WEST SUMATRA INDAH	Wisata tirta	Kota Padang	Australia	3201150/PMA/2018	-	0	2
Total						167.113,90	7.140	46

Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDE AP. M. SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19740618 199311 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
REALISASI INVESTASI PMDN
TAHUN 2019

No	Nama Perusahaan	Cetak Bidang Usaha	Kabkot	No Izin	TOTAL		
					Tambahan Investasi (Dalam US\$, Ribu)	TKI	TKA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BRANTAS CAKRAWALA ENERGI	KETENAGALISTRIKAN	Kabupaten Pesisir Selatan	8120004772462	131.083,90	124	0
2	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM	Kabupaten Agam	8120004782505	68.909,50	100	0
3	DAIMA CITRA PRIMA	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Kota Padang	9120002142648	481.764,90	7	0
4	SUPRACO MITRA ENERGIE	Pembangkitan tenaga listrik	Kabupaten Solok	389/1/IP/PMDN/2017	36.067,80	12	0
	SUPRACO MITRA ENERGIE	Pembangkitan tenaga listrik	Kabupaten Solok	8120109803009	2.857,90	0	0
	SUPRACO MITRA ENERGIE	KETENAGALISTRIKAN	Kabupaten Solok	8120109803000	28.832,90	9	0
5	KUNANGO JANTAN	Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes	Kabupaten Padang Pariaman	2/13/PI-PL/PMDN/2018	24.000,00	3	0
	KUNANGO JANTAN	Industri Logam Dasar Besi Dan Baja	Kabupaten Padang Pariaman	1/13/IU/PMDN/2014	0,00	11	0
	KUNANGO JANTAN	Industri Logam Dasar Besi Dan Baja	Kabupaten Padang Pariaman	1/13/IU/PMDN/2014	0,00	60	0
6	PESONA INDONESIA MULIA	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Kota Bukittinggi	8120014250731	14.000,00	45	0
	PESONA INDONESIA MULIA	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Kota Bukittinggi	1/1375/PI/PMDM/2018	21.000,00	0	0
	PESONA INDONESIA MULIA	hotel bintang tiga	Kota Bukittinggi	1/1375/PI/PMDM/2018	20.000,00	0	0

7	TRANSCO ENERGI UTAMA	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Kabupaten Pesisir Selatan	1/13/IP/PMDN/2016	15.515,20	72	0
	TRANSCO ENERGI UTAMA	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Kabupaten Pesisir Selatan	812011120427	18.508,40	0	0
8	MATAHARI PUTRA PRIMA TBK	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAJI DI TOKO	Kota Padang	8120214051585	10.467,70	0	0
9	SUMBAR CALCIUM PRATAMA	Batu Galian	Kabupaten Lima Puluh Kota	116/BPMPPT-LK/2014	11.299,80	48	0
10	GASINDO ABADI SEMESTA	Jasa Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji	Kota Payakumbuh	1/1376/PPM/I/PMDN/2012	7.846,50	17	0
11	ADIPATI KARYA PASTIKA	Pembangunan Perumahan	Kabupaten Sijunjung	7/1304/PI/PMDN/2018	7.255,90	11	0
12	HUTAMA KARYA (PERSERO)	Konstruksi pembangunan jalan tol	Kabupaten Padang Pariaman	PERPRES/100/2014	207.926,20	0	0
13	MUTIARA AGAM	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahannya menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit	Kabupaten Agam	1/13/IU/IV/PMDN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/PERTANIAN/2013	28.481,70	11	0
14	BAJRADIKA RANGKIANG ENERGI	Ketenagalistrikan	Kabupaten Agam	33/1/IUPTL-T/PMDN/2015	8.106,60	0	0
15	OSCAR PADANG AGRO LESTARI	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM	Kabupaten Sijunjung	9120203250113	3.462,30	1.231	0
	OSCAR PADANG AGRO LESTARI	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kabupaten Sijunjung	3/1304/IP/PMDN/2018	2.063,00	196	0
16	MAXIMA UTAMA JAYA	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (Perumahan)	Kabupaten Sijunjung	2/1304/PI-PL/PMDN/2018	3.947,80	0	0
	MAXIMA UTAMA JAYA	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (Perumahan)	Kabupaten Sijunjung	2/1304/PI-PL/PMDN/2018	1.007,90	0	0
17	MUTIARA DAMAI	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Kabupaten Agam	2/1307/PI-PL/PMDN/2018	2.800,00	8	0
	MUTIARA DAMAI	Perumahan	Kabupaten Agam	26/1307/IP/PMDN/2016	1.500,00	13	0
	MUTIARA DAMAI	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Kabupaten Agam	4/1307/PI-PL/PMDN/2018	1.395,00	10	0
18	ABIPRAYA NUSANTARA ENERGI	KETENAGALISTRIKAN	Kabupaten Solok Selatan	8120100882806	2.750,00	1	0
19	GADANG HIDRO ENERGI	KETENAGALISTRIKAN	Kabupaten Solok Selatan	8120008811561	2.700,00	1	0

20	GUNUNG BERKAT SEJAHTERA	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA	Kabupaten Sijunjung	8120018251714	2.418,10	19	0
21	TELABANG ROKAN INDONESIA	Industri Penyamakan Kulit (PVA Chamois)	Kabupaten Sijunjung	6/1304/IP/PMDN/2017	2.199,00	0	0
	TELABANG ROKAN INDONESIA	INDUSTRI ALAS KAKI		9120101432696	29,10	0	0
22	PESISIR HIDRO ENERGI	Pembangkitan tenaga listrik	Kabupaten Agam	13/IUPTL-T/PMDN/2016	1.969,00	0	0
23	IRAWATI PALANO JAYA	REAL ESTATE (PERUMAHAN)	Kota Payakumbuh	5/1376/IP/PMDN/2016	1.930,60	2	0
24	YASMIN SYAHRUL MEDIKA	JASA RUMAH SAKIT	Kota Solok	8120108843306	1.925,40	2	0
25	BYDARA JAYA DEVELINDO	Konstruksi Gedung	Kota Solok	3/1372/IP/PMDN/2017	1.650,00	2	0
26	HARDI KARYA	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	Kabupaten Sijunjung	3/1304/IP/PMDN/2014	1.252,10	0	0
27	WIJOYO ORIDINA PROPERTI	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (Pembangunan Perumahan)	Kabupaten Sijunjung	3/1304/PI-PL/PMDN/2018	3.644,50	6	0
28	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	Telekomunikasi dengan kabel dan tanpa kabel berikut penunjangnya	Kota Padang	33/1/IP/II/PMDN/2011	1.100,00	0	0
29	YUNDA	Bahan Bangunan dari Kayu	Kabupaten Sijunjung	522/144/2015	763,70	0	0
30	BINTARA TANI NUSANTARA	Perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan minyak kasar (minyak makan) dari nabati	Kabupaten Pasaman Barat	79/1/II/II/PMDN/PERTANIAN/INDUSTRI/2010	706,70	0	0
31	ANUGRAH BINA SARANA	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	Kabupaten Sijunjung	2/1304/IP-PL/PMDN/2017	1.301,30	0	0
	ANUGRAH BINA SARANA	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	Kabupaten Sijunjung	2/1304/IP-PL/PMDN/2017	168,80	11	0
	ANUGRAH BINA SARANA	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	Kabupaten Sijunjung	2/1304/IP-PL/PMDN/2015	36,00	0	0
	ANUGRAH BINA SARANA	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	Kabupaten Sijunjung	2/1304/IP-PL/PMDN/2015	0,00	2	0
	ANUGRAH BINA SARANA	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA	Kabupaten Sijunjung	8120013013014	25,30	3	0

32	ANTARMITRA SEMBADA	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Kota Padang	8120004882778	1,562,50	39	0
33	MOEDELO CITRA NUSANTARA	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA	Kabupaten Sijunjung	8120102981935	1,151,30	8	0
34	CAHAYA AGAM LESTARI	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Kabupaten Agam	8120113112197	604,70	9	0
	CAHAYA AGAM LESTARI	Perdagangan springbed	Kabupaten Agam	8120113112197	372,20	25	0
35	DEMPO SOLSEL ENERGI	Transmisi tenaga listrik	Kabupaten Solok Selatan	349/1/IP/PMDN/2016	1,089,30	0	0
36	REAF JAYA ABADI	Pembangunan Perumahan	Kabupaten Sijunjung	1/1304/IP-PL/PMDN/2017	628,00	0	0
	REAF JAYA ABADI	Pembangunan Perumahan	Kabupaten Sijunjung	11/1304/IP/PMDN/2015	352,00	0	0
37	RUMENDRA KARYA MULYA	KONSTRUKSI GEDUNG	Kota Solok	8120111170695	380,00	6	0
38	MULTIKARYA SAWIT PRIMA	Perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kasar dari nabati	Kabupaten Solok Selatan	42/1/PMDN/2007	2,072,00	1	0
39	SURYA PADANG KHATULISTIWA	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kabupaten Sijunjung	2/1304/IP/PMDN/2018	518,50	23	0
	SURYA PADANG KHATULISTIWA	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kabupaten Sijunjung	2/1304/IP/PMDN/2018	43,90	301	0
40	SURYA JAYA PERKASA SELARAS	Industri Kapur	Kabupaten Sijunjung	30/13/IP/PMDN/2016	280,00	0	0
	Surya Jaya Prakarsa Selaras	Industri Penggilingan Batu Kapur	Kabupaten Sijunjung	1/1304/IU/PMDN/2018	11,50	0	0
41	MARSAWA INDAH MANDIRI	Penimbunan Sisa Hasil Pembakaran Batu Bara (Limbah B3)	Kabupaten Sijunjung	4/1304/PI/PMDN/2018	261,40	7	0
	MARSAWA INDAH MANDIRI	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN	Kota Payakumbuh	9120001311002	200,00	0	0
42	TRANS REKREASINDO	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	Kota Padang	16/1/IP-PL/PMDN/2017	937,70	0	0
43	ANDALAS DOLOMIT SEJAHTERA	Industri Penggilingan Batu Dolomit	Kabupaten Sijunjung	12/1304/IP/PMDN/2014	239,80	18	0
	ANDALAS DOLOMIT SEJAHTERA	Industri Penggilingan Batu Dolomit	Kabupaten Sijunjung	12/1304/IP/PMDN/2014	146,20	0	0
44	BUMI MUTIARA SEJATI	Konstruksi Gedung Tempat Tinggal	Kabupaten Sijunjung	4/1304/IP/PMDN/2016	835,00	0	0

45	TANAYA OLAH PAKARTI	Pembangkitan tenaga listrik	Kabupaten Solok	410/1/IP/PMDN/2017	705,50	0	0
	TANAYA OLAH PAKARTI	Pembangkitan tenaga listrik	Kabupaten Solok	410/1/IP/PMDN/2017	31,40	0	0
46	ZAINSTY EKSPRES TRANSINDO	POS	Kota Payakumbuh	8120216100727	130,00	7	0
47	HOTEL TAUFINA	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Kota Solok	9120107312273	120,50	10	0
48	PARIT PADANG GLOBAL	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Kota Padang	8120204832099	761,40	69	0
49	DELAPAN PUTERI PANGERAN	Jasa Reservasi Lainnya	Kota Padang Panjang	03/1/IP-PMDN/DPM&PTSP/I- 2018	135,00	15	0
50	YUNNEDI	Industri Penggergajian Kayu (Sawmill)	Kabupaten Sijunjung	2/1304/IP/PMDN/2017	77,00	0	0
					11,00	0	0
51	INSAN MUTIARA ENERGI	Pembangkitan tenaga listrik	Kabupaten Tanah Datar	220/1/IP/PMDN/2016	154,10	0	0
52	PADANG SUMATERA SAWINDO	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit	Kabupaten Sijunjung	1/1304/IP/PMDN/2018	39,30	0	0
53	AIR SUMBER ENERGI	Pembangkitan Energi Listrik	Kabupaten Agam	14/13/IP/PMDN/2016	65,00	10	0
54	TALU ENERGY	Pembangkitan tenaga listrik	Kabupaten Pasaman Barat	326/1/IP/PMDN/2016	91,50	0	0
55	BATANG LEMBANG ENERGY	Pembangkitan tenaga listrik	Kabupaten Solok	34/1/IP/PMDN/2015	88,30	0	0
56	PUTRA HARYANDA	Jasa Rumah Sakit Swasta	Kabupaten Sijunjung	9/1304/IP/PMDN/2015	60,00	0	0
57	SUMBAR ANDALAS SAWIT INDOJAYA	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Sijunjung	8/1304/IP/PMDN/2015	74,00	0	0
59	GALATTA LESTARINDO	Industri Penggilingan Batu Kapur Pertanian (Pupuk Dolomit)	Kabupaten Sijunjung	2/1304/IU/PMDN/2016	206,00	97	0
		Penggalian Batu Kapur/Gamping		3/13/IP/PMDN/2016	9,00	0	0
59	TRANS RETAIL INDONESIA	Jasa makanan dan minuman	Kota Padang	15/1/IP-PL/PMDN/2016	60,20	0	0
60	BAYANG NYALO HIDRO	Ketenagalistrikan	Kabupaten Pesisir Selatan	3/1302/IP/PMDN/2015	3.919,00	0	0
61	KLINIK KURNIA MEDICA II	Jasa Poliklinik Swasta	Kabupaten Sijunjung	14/1304/IP/PMDN/2015	20,30	0	0

62	AVICENA CENDEKIA MEDIKA	Jasa Poliklinik Swasta	Kabupaten Sijunjung	2/1304/IU/PMDN/2017	8,00	0	0
62	AIKES TANJUNG MANDIRI	Pengolahan batuan	Kabupaten Lima Puluh Kota	544/194/2017	0,00	9	0
64	KELOK SEMBILAN GEMILANG	KETENAGALISTRIKAN	Kota Payakumbuh	9120001311002	0,00	3	0
65	TIDAR KERINCI AGUNG	PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PENGOLAHANNYA MENJADI MINYAK SAWIT (CPO) INTI SAWIT	Kabupaten Solok Selatan	505/T/PERTANIAN/1997	326.467,90	1.289	0
66	DAS INDONESIA HOTEL	PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA	Kabupaten Agam	9120307361441	18.500,00	12	0
67	GS POWER	KETENAGALISTRIKAN	Kabupaten Lima Puluh kota	8120314081196	16.947,90	0	0
68	REKSO NASIONAL FOOD	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) DAN PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA	Kota Padang	8120200851759	14.355,10	31	0
69	PATI BUANA SEMESTA	PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BUIH BESI	Kota Sawah Lunto	9120002420127	10.700,00	79	0
70	BIOMASS ANDALAN ENERGI	PENGUSAHAAN HUTAN	Kabupaten Kepulauan Mentawai	8120006921456	8.938,90	13	0
	BIOMASS ANDALAS ENERGI	INDUSTRI PENGGERAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	Kabupaten Kepulauan Mentawai	8120006921456	5.525,10	0	0
71	NOVA MART	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO	Kota Solok	8120009853309	1.700,00	2	0
72	FAKTANUSA CIPTA GRAHA	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	Kabupaten Pesisir Selatan	5/13/IP/PMDN/2016	1.316,00	28	0
73	MERAPI UTAMA PHARMA	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Kota Padang	8120001721796	1.263,50	34	0
74	KAMIKO NANO SIGINTIR UTAMA	Pembangkitan tenaga listrik	Kabupaten Solok Selatan	116/1/IP/PMDN/2017	1.236,40	0	0
	KAMIKO NANO SIGINTIR UTAMA	Ketenagalistrikan (PLTA)	Kabupaten Solok Selatan	7/13/IP/PMDN/2016	952,20	0	0

75	KAMPUANG SAROSAH	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA	Kabupaten Lima Puluh Kota	8120005911724	959,90	4	0
	KAMPUANG SAROSAH	KAWASAN PARIWISATA	Kabupaten Lima Puluh Kota	3/1308/PI/PMDN/2018	260,00	0	0
76	KAMIKO SANGIR SAIYO	Pembangkitan tenaga listrik	Kabupaten Solok Selatan	118/1/IP/PMDN/2017	923,60	0	0
77	CV. KLINIK GUNUANG	JASA RUMAH SAKIT	Kota Padang Panjang	8120215172785	900,00	12	0
78	AIR GANING CITY	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL (PERUMAHAN)	Kabupaten Sijunjung	1/1304/PI-PL/PMDN/2018	1.923,50	34	0
79	COBRA DENTAL INDONESIA	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Kota Padang	8120001812156	361,20	0	0
80	CAKRAWALA KELOK SEMBILAN	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Kabupaten Lima Puluh Kota	9120004381128	350,00	0	0
81	MINANG KAYO ABADI	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU	Kota Padang Panjang	9120203240617	332,00	7	0
82	AGRATA PRIMA	KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API	Kota Padang Panjang	9120107171164	300,00	2	0
83	RAJAWALI LIKI ENERGI	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kabupaten Solok Selatan	23/1/PI/PMDN/2018	321,70	0	0
84	TEKAD JAYA	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	Kabupaten Lima Puluh Kota	1/1308/PI-PL/PMDN/2018	40,00	0	0
85	PERKEBUNAN NUSANTARA VI (PERSERO)	Perkebunan Tanaman Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous)	Kabupaten Lima Puluh Kota	3/1308/IP-PL/PMDN/2015	20.792,50	290	0
86	HALABAN BUMI MINERAL	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	Kabupaten Lima Puluh Kota	3/1308/IP/PMDN/2017	166,20	5	0
87	TRIMUDA JAYA PERKASA	INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA	Kota Padang	9120006381266	0,00	2	0
88	ANAGATA PRIMA JAYA	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Kota Padang Panjang	8120213121929	0,00	2	0

89	ANANDA PUTRI	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Kota Padang Panjang	9120300272317	0,00	2	0
90	GADING LESTARI PHARMA	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Kota Padang	9120207341921	0,00	12	0
91	UNGGUL SEJAHTERA RAYA	ANGKUTAN LAUT	Kota Padang	9120402541569	96,00	4	0
	UNGGUL SEJAHTERA RAYA	Keagenan	Kota Padang	9120402541569	126,00	0	0
92	RADIO SUARA SEJAHTERA PADANG (RESPON FM)	Penyiaran Radio	Kabupaten Padang Pariaman	3/1306/PI/PMDN/2018	0,00	2	0
93	SEMEN PADANG	INDUSTRI SEMEN PORLAND DAN PENAMPUNGAN SEMEN (SILO)	Kota Padang	I/T/INDUSTRI/2001	480.855,60	141	0
	SEMEN PADANG	JASA RUMAH SAKIT	Kota Padang	9120109853908	117.273,30	519	0
94	INTERCOM MOBILINDO	PERDAGANGA MOBIL	Kota Padang	8120013142728	62.013,90	249	0
95	FAMILY RAYA	Industri Karet	Kota Padang	KEP 414/MK/DBTJ/PB/PM/IDU/6 /70	49.994,90	330	0
96	REGINA CAHAYA INSANI	JASA RUMAH SAKIT	Kota Padang	9120004942844	12.220,20	86	0
97	FAST FOOD INDONESIA Tbk	JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)	Kota Padang	8120216033701	367,60	7	0
98	RAJO BATUAH RESORT INDONESIA	JASA BIRO PERJALANAN WISATA	Kota Padang	2/1371/IP/PMDN/2016	298,40	0	0
99	KARYA MUDA BAHARI	PERGUDANGAN	Kota Padang	9120002230249	105,00	6	0
100	MULTIKARYA LISUN PRIMA	PENGUSAHA HUTAN	Kota Padang	91205055773314	34,50	8	0
101	DOS-NI-ROHA	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Kota Padang	8120211051828	227,90	30	0
102	SUMBER PENIKARYA	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Kota Padang	8120014151268	0,00	2	0

103	SUNGAI JIRAK	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Kota Padang	9120302970521	0,00	2	0
104	KARBINDO ABESSYAPRADHI	SUNGAI TAMBANG KILIRAN JAO, KEC. KAMANG BARU	Kabupaten Sijunjung	9120004301254	38.435,80	3	0
105	SELAGO MAKMURPLANTATION	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahannya	Kabupaten Sijunjung	152/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2/004	2.518,20	0	0
	SELAGO MAKMUR PLATATION	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	Kabupaten Dharmasraya	8120107961793	1.027,90	0	0
106	TAZAR MINERAL PERKASA	PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT	Kabupaten Sijunjung	91202026443109	2.000,00	0	0
107	SUMBER KEBERKAHAN REZEKI	REAL ESTATYANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWAKAN	Kabupaten Sijunjung	9120107112124	2.069,80	6	0
108	ANDALAS BUMI LESTARI	ANGKUTAN JALAN REL	Kabupaten Sijunjung	9120308411254	1.476,30	0	0
109	HAKAASTON	Idsutri bahan galian bukan logam lainnya (aspal mixing plant dan stone	Kabupaten Sijunjung	3/1304/IU/PMDN/2017	62,00	0	0
	HAKAASTON	Industri barang galian bukan barang lainnya	Kabupaten Sijunjung	3/1304/IU/PMDN/2017	20,00	0	0
110	KARBINDO INTERNASIONAL	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM	Kabupaten Sijunjung	9120104152384	27,00	1	0
111	MASAWA INDAH MANDIRI	Perimbunan Gabling, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	4/1304/PI/PMDN/2018	0,00	0	0
112	KORAL KAMPAR	Penggalian Kerikil (Sirtukil)	Kabupaten Lima Puluh Kota	21/13/IP/PMDN/2016	425,00	20	0
113	BATHARA BIRU BENGAWAN	KETENAGALISTRIKAN	Kab. Solok Selatan	9120103651049	950,00	0	0
114	BHARKAH AMMANATUL INSAN	REAL ESTAT YANG YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN	Kota Solok	8120011282259	0,00	0	0
115	PILAR ANDALAS BETON	INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA	Kabupaten Padang Pariaman	9120200182531	847,20	0	0
	PILAR ANDALAS BETON	Perdagangan besar semen , kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi porperti	Kabupaten Padang Pariaman	9120200182531	27,30	0	0

116	PAHLAWAN UTAMA SEJAHTERA	Perdagangan Eceran Khusus bahan bakamdraan bermotor	Kabupaten Padang Pariaman	24/1306/IU/PMDN/2014	0,00	29	0
117	USAHA SAWIT MANDIRI	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM	Kabupaten Pasaman Barat	9120202221582	2.359,00	0	0
	USAHA SAWIT MANDIRI	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng	Kabupaten Pasaman Barat	3/13/IU/PMDN/2018	1.242,50	0	0
118	PASAMANMARAMA SEJAHTERA	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	Kabupaten Pasaman Barat	9120101193713	121.307,50	0	0
	PASAMANMARAMA SEJAHTERA	Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengelolaan lahan	Kabupaten Pasaman Barat	9120101193713	1.212,60	0	0
	PASAMANMARAMA SEJAHTERA	Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu dengan unit pengolahannya	Kabupaten Pasaman	354/T/PERKEBUNAN/INDUSTRI/2004	1.212,60	0	0
119	SUMATERAJAYA AGROLESTARI	Perkebunan Kelapa Sawit Dan Industri Minyak Kasar (minyak makan) dari Nabati	Kabupaten Pesisir Selatan	32/II/PMDN/2006	1.466,90	353	1
	SUMATERAJAYA AGROLESTARI	Perkebunan Kelapa Sawit Dan Industri Minyak Kasar (minyak makan) dari Nabati	Kabupaten Pesisir Selatan	8120106910174	112,10	0	0
	SUMATERAJAYA AGROLESTARI	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	Kabupaten Pesisir Selatan	8120106910174	238,80	0	0
120	YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM SUMATERA BARAT	JASA RUMAH SAKIT	Kota Padang Panjang	8120001802155	12.049,90	142	0
121	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	KETENAGALISTRIKAN	Kota Padang	8120003820135	2.200,00	0	0
122	TARUSAN KOKOH ENERGI	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	Kabupaten Pesisir selatan	338/I/IP/PMDN/2016	50,00	10	0
123	Barkah Ammatul Inan	Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	Kota Solok	8120011282259	3.000,00	0	0
124	LARAS INTERNUSA	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Pasaman Barat	8120004812745	175.252,70	24	0
125	CAHAYAMURNI ANDALAS PERMAI	Matras dan Kasur Busa	Kota Padang	9120007421453	92.490,00	416	0

126	FELIXINDO HIRZI UTAMA	Angkutan Mobil	Kota Padang	9120406931174	40.992,80	0	0
	FELIXINDO HIRZI UTAMA	Penyewaan alat berat dan kendaraan bermotor	Kota Padang	9120406931174	40.992,80	0	0
127	LUBU HIDRO ENERGI	Penyedia usaha kelistrikan dan membangun pembangkit listrik tenaga air	Kabupaten Pasaman	8120119082722	39.100,00	15	0
128	PUSARA BINA TAMBANG	Jasa kontraktor tambang	Kabupaten Sijunjung	9120005361059	20.900,00	3	0
129	KARYA SEMANGAT MANDIRI	Peternakan	Kabupaten Padang Pariaman	8120004971856	12.864,30	0	0
130	MUARA SAWIT LESTARI	Industri Pengolahan Minyak Mentah Kelapa Sawit (CPO) dan Industri Pengolahan	Kabupaten Pesisir Selatan	9120107222802	11.072,60	85	0
131	UMEGA SEMBILAN BERLIAN	Perdagangan	Kabupaten Dharmasraya	9120402841596	10.592,30	46	0
132	OPTIMA TIRTA ENERGY	Pembangkitan tenaga listrik	Kabupaten Pasaman Barat	234/1/IP/PMDM/2016	6.589,00	0	0
133	DOFLA JAYA PROPERTI	Properti	Kabupaten Padang Pariaman	23/1306/IP/PMDM/2017	3.461,90	0	0
134	NUSANTARA BETA FARMA	Industri Farmasi, Industri Kosmetik, Industri PKRT	Kabupaten Padang Pariaman	8120102840475	2.800,70	66	0
	NUSANTARA BETA FARMA	Industri Farmasi dan produk obat kimia	Kabupaten Padang Pariaman	11/1306/UI/PMDM/2017	0,00	135	0
135	PERUSAHAAN BONGKAR MUAT HAMBUS PUTRA SAMUDERA	Bongkar muat barang dari dan ke kapal	Kota Padang	9120409821952	1.426,00	6	0
136	INANG SARI	Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman	Kabupaten Agam	1/3/1U/1/PMDM/PERTANIAN/2012	1.248,90	0	0
137	OSCAR INVESTAMA	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Sijunjung	9120300112297	1.128,40	204	0
138	PADANG DISTRIBUSINDO RAYA	Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya perdagangan	Kota Padang	8120313071995	817,60	0	0
139	TOWER BERSAMA	Penyelenggara infrastruktur telekomunikasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	8120003960254	2.400,00	30	0

140	KURNIA INDAH TRANS	Kelompok ini mencakup pengoperasian angkutan darat lainnya untuk penumpang	Kota Padang	8120111190091	500,00	26	0
141	ANUGRAH ARGON MEDICA	Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran	Kota Padang	8120304840121	398,00	1	0
142	PEMANFAATAN TENAGA AIR	Ketenagalistrikan	Kabupaten Pesisir Selatan	24/13/IP/PMDN/2016	210,00	1	0
143	SINERJI TENAGA AIR	Ketenagalistrikan	Kabupaten Pesisir Selatan	25/13/IP/PMDN/2016	210,00	1	0
144	MITRA KERINCI	Pembangkitan energi listrik	Kabupaten Solok Selatan	11/13/IP/PMDN/2016	153,40	0	0
145	TJAHAJA BARU	Perdagangan Besar Motor	Kota Padang	9120308860999	150,00	30	0
146	RIMBUN PADI BERJAYA	Gula Packing	Kota Padang	9120107890637	101,60	9	0
147	TIGA SARI PRIMATAMA	Usaha Perdagangan Besar Makanan dan Minuman	Kota Padang	9120109312264	100,00	39	0
148	BERINGIN GIGANTARA	Jasa pengolahan uang rupiah terdiri dari distribusi uang rupiah	Kota Padang	8120101600772	70,30	24	0
149	NIAGATAMA KENCANA	Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa	Kabupaten Pasaman Barat	8120019071763	11,00	3	0
150	DEMPO CIPTA ENERGI	Pembangkitan tenaga listrik	Kab. Solok Selatan	216/1/IP/PMDM/2016	2,20	0	0
151	DEMPO INSAN MUTIARA	Pembangkitan Energi Listrik	kabupaten tanah Datar	218/1/IP/PMDM/2016	0,50	0	0
152	INSAN MURTIARA CIWANDAN	Pembangkitan tenaga listrik	kabupaten tanah Datar	162/1/IP/PMDM/2015	0,50	0	0
153	JAYA SENTRIKON INDONESIA	Industri barang-barang dari beton, semen dan Gips	Kabupaten Padang Pariaman	1/13/IU-PL/PMDM/2014	0,00	5	0
154	TRISHA MITRA SEJATI	Pembangunan Gedung	Kota Padang	9120509793807	0,00	3	0
155	DOK MARINA BUNGUS	Produksi, perbaikan dan pemeliharaan kapal motor	Kota Padang	8120006912502	0,00	35	0
156	EKAWEEN CIPPTA UTAMA	Perdagangan besar berbagai macam material bangunan	Kota Padang	9120006962387	0,00	2	0
157	PUJANGGA	perdagangan	Kota Padang	9120101880652	0,00	1	0
158	RAJAWALI NUSINDO	Distribusi dan perdagangan	Kota Padang	8120108830934	0,00	1	0
159	GRAHA AMALIA PRADHANA PADANG	Jasa perhotelan	Kota Padang	9120209342529	0,00	90	0

160	ADI SARANA ARMADA	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk mobil dan truk	Kota Padang	9120009842916	0,00	16	0
161	PERMATA BUNDA SOLOK	Perdagangan jasa	Kota Solok	9120102930239	0,00	7	0
TOTAL					3.026.645,80	7.828	1

Kepala DPMK PTSP
Provinsi Sumatera Barat



MASWAR DEDI AP. M. SI

Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001